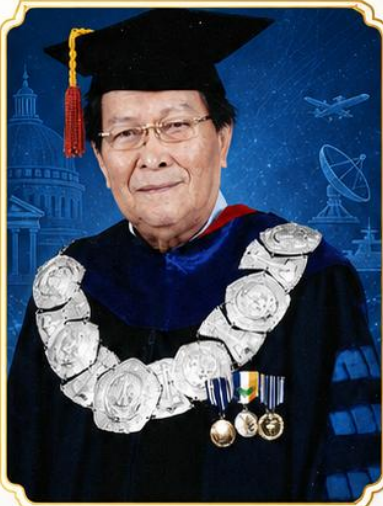




Prof Rudy C Tarumingkeng, PhD

 www.rudycct.com/cv.pdf

 IBM - ASMI

DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Apakah Keduanya Masih Berjalan Seiring di Indonesia?



Jawaban Singkat

YA, masih bisa berjalan seiring — tetapi tidak otomatis. Hubungan keduanya bergantung pada *rule of law*, kapasitas negara, transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan hasil pembangunan.



FAKTA EKONOMI INDONESIA

-  • Pertumbuhan ekonomi 2025: **5,11%**
-  • PDB per kapita 2025: **Rp83,7 juta (USD 5.083,4)**
-  • Kemiskinan Maret 2025: **8,47%**
-  • Gini Ratio Maret 2025: **0,375**
-  • IPM 2025: **75,90**



FAKTA DEMOKRASI

-  • IDI 2025: **78,19** (kategori sedang)
-  • Freedom House 2025: **56/100** (Partly Free)
-  • Demokrasi elektoral tetap berjalan
-  • Kebebasan sipil, *checks & balances*, dan kualitas institusi perlu diperkuat



MENGAPA BISA TIDAK SEIRING?

- Biaya politik tinggi
- Korupsi dan *rent seeking*
- Ketimpangan kesempatan
- Pelemahan *rule of law*
- Polarisasi dan disinformasi
- Kebijakan jangka pendek



KAPAN KEDUANYA SEIRING?

- Pemilu kompetitif dan akuntabel
- Birokrasi profesional
- Kepastian hukum
- Media dan data yang terbuka
- Pertumbuhan yang inklusif
- Pekerjaan produktif dan kelas menengah kuat



AGENDA STRATEGIS INDONESIA

- Reformasi produktivitas
- Penguatan *rule of law*
- Transparansi anggaran dan pembiayaan politik
- Pendidikan, riset, dan inovasi
- Perlindungan sosial tepat sasaran
- *Digital governance* dan antikorupsi



KESIMPULAN

Demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia masih dapat berjalan seiring, tetapi hubungan itu harus dijaga melalui institusi yang kuat, kebijakan yang adil, dan pemerintahan yang akuntabel.



Sumber ringkas: BPS 2025–2026, World Bank 2025, Freedom House 2025.

DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI: APAKAH KEDUANYA MASIH BERJALAN SEIRING DI INDONESIA?

Prof. Ir. Rudy C. Tarumingkeng, PhD

www.rudyct.com/cv.pdf

IBM - ASMI (Institut Bisnis dan Multimedia)

[RudyCT Academic Series](#) - 2026

Abstrak

Artikel ini membahas hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi di Indonesia dengan pertanyaan utama apakah keduanya masih berjalan seiring. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan membandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan indeks demokrasi, karena demokrasi dan pembangunan bekerja melalui rangkaian institusi, insentif, distribusi kekuasaan, kapasitas negara, kualitas kebijakan, kepercayaan publik, dan struktur sosial-ekonomi. Indonesia menunjukkan paradoks yang menarik. Di satu sisi, sejak Reformasi 1998 negara ini mempertahankan pemilu kompetitif, pergantian kekuasaan secara damai, desentralisasi, kebebasan politik yang jauh lebih luas dibanding era sebelumnya, dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Pada 2025 ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen, tingkat kemiskinan Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen, rasio Gini menjadi 0,375, dan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,90. Di sisi lain, berbagai indikator demokrasi menunjukkan tantangan pada kualitas kebebasan sipil, checks and balances, korupsi, independensi institusi, kebebasan digital, kompetisi politik, serta kualitas deliberasi publik. Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada pada 78,19 atau kategori sedang; Freedom House mengategorikan Indonesia “Partly Free”; dan V-Dem 2026 menempatkan Indonesia dalam kategori electoral autocracy plus untuk 2025. Perbedaan metodologi indikator tersebut harus dipahami secara hati-hati, tetapi secara bersama-sama ia menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berlanjut meskipun kualitas demokrasi mengalami tekanan. Artikel ini berargumen bahwa demokrasi dan pembangunan ekonomi tidak memiliki hubungan otomatis, linear, atau satu arah. Demokrasi berpotensi memperkuat pembangunan bila ditopang rule of law, akuntabilitas, birokrasi profesional, kebijakan berbasis bukti, kompetisi yang sehat, inklusi sosial, serta kapasitas negara. Sebaliknya, pertumbuhan tanpa institusi demokratis yang kuat dapat menghasilkan konsentrasi rente, kebijakan yang kurang akuntabel, ketimpangan kesempatan, dan pembangunan yang secara politik rapuh. Bagi Indonesia, pertanyaan strategisnya bukan memilih demokrasi atau pembangunan, melainkan membangun demokrasi yang mampu menghasilkan negara efektif dan pembangunan yang memperluas kebebasan, kesempatan, serta martabat warga negara.

Kata Kunci: Demokrasi; pembangunan ekonomi; pertumbuhan ekonomi; institusi; Indonesia; rule of law; good governance; ketimpangan; kelas menengah; Reformasi; state capacity; inclusive development.

Ringkasan Indikator Kontemporer Indonesia

Indikator	Nilai/Status	Catatan
Pertumbuhan ekonomi 2025	5,11%	BPS, rilis 5 Februari 2026
PDB per kapita 2025	Rp83,7 juta / USD 5.083,4	BPS
Kemiskinan Maret 2025	8,47%	23,85 juta orang; BPS
Rasio Gini Maret 2025	0,375	Turun dari 0,381 pada September 2024; BPS
IPM 2025	75,90	Naik 0,83 poin dari 2024; BPS
Indeks Demokrasi Indonesia 2025	78,19 - kategori sedang	BPS, evaluasi nasional 2026
Freedom in the World 2025	56/100 - Partly Free	Freedom House
Freedom on the Net 2025	48/100 - Partly Free	Freedom House
V-Dem 2025	Electoral Autocracy Plus	V-Dem Democracy Report 2026; klasifikasi berbasis metodologi V-Dem

Catatan: indeks demokrasi di atas menggunakan konsep dan metodologi berbeda, sehingga tidak boleh dibandingkan secara langsung sebagai satu skala yang sama. Tabel digunakan sebagai triangulasi, bukan sebagai penetapan tunggal kualitas demokrasi.

1. Pendahuluan: Pertanyaan yang Kembali Menjadi Relevan

Hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi merupakan salah satu perdebatan tertua dalam ilmu politik, ekonomi politik, dan studi pembangunan. Selama beberapa dekade, pertanyaan itu sering dirumuskan secara sederhana: apakah demokrasi membantu pertumbuhan ekonomi, atau justru negara yang sedang mengejar pertumbuhan membutuhkan pemerintahan yang lebih terkonsentrasi dan mampu mengambil keputusan cepat? Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa tidak ada jawaban tunggal. Ada demokrasi yang tumbuh cepat, demokrasi yang stagnan, negara non-demokratis yang berhasil melakukan industrialisasi, dan negara non-demokratis yang gagal membangun ekonomi serta terjebak dalam konflik dan korupsi.

Indonesia merupakan laboratorium penting bagi perdebatan tersebut. Setelah krisis 1997-1998 dan jatuhnya pemerintahan Orde Baru, Indonesia memasuki era Reformasi. Sistem politik berubah secara fundamental: pemilu menjadi lebih kompetitif, partai politik berkembang, presiden dipilih langsung, pers memperoleh ruang lebih luas, kekuasaan didesentralisasikan, dan institusi pengawasan diperkuat. Banyak pengamat pada awal Reformasi mengkhawatirkan bahwa demokratisasi akan mengganggu stabilitas ekonomi. Kekhawatiran itu tidak sepenuhnya terbukti. Indonesia berhasil keluar dari krisis, menjaga pertumbuhan dalam jangka panjang, menurunkan kemiskinan, memperluas kelas konsumsi, dan mempertahankan stabilitas makroekonomi.

Namun dua dekade lebih setelah Reformasi, pertanyaan baru muncul. Jika ekonomi masih tumbuh, apakah kualitas demokrasi juga tetap membaik? Apakah keberhasilan ekonomi dapat dipakai sebagai bukti bahwa institusi demokrasi tetap sehat? Atau sebaliknya, dapatkah pembangunan ekonomi berjalan relatif baik dalam jangka menengah sekalipun kualitas demokrasi melemah? Pertanyaan ini semakin penting ketika terdapat perbedaan antara indikator makroekonomi yang relatif stabil dan evaluasi sejumlah lembaga terhadap tekanan pada kebebasan sipil, ruang digital, checks and balances, serta kompetisi politik.

Data terbaru menunjukkan wajah ganda tersebut. Badan Pusat Statistik melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025, lebih tinggi dibanding 5,03 persen pada 2024. PDB per kapita mencapai sekitar Rp83,7 juta atau USD 5.083,4. Kemiskinan Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen dan rasio Gini menjadi 0,375. Indeks Pembangunan Manusia 2025 mencapai 75,90. Pada saat yang sama, Indeks Demokrasi Indonesia 2025 berada pada 78,19 dan dikategorikan sedang. Freedom House memberi skor 56/100 dalam Freedom in the World 2025 dan menyebut Indonesia “Partly Free”, sedangkan Freedom on the Net 2025 memberi skor 48/100. V-Dem Democracy Report 2026 mengklasifikasikan Indonesia pada 2025 sebagai “electoral autocracy plus”. Karena lembaga-lembaga tersebut memakai konsep dan metodologi berbeda, skor tidak dapat dibandingkan secara mekanis. Akan tetapi, semuanya cukup untuk memunculkan pertanyaan akademik: apakah pertumbuhan ekonomi dan demokrasi masih bergerak dalam arah yang saling memperkuat?

Artikel ini mengambil posisi bahwa istilah “berjalan seiring” harus dipahami secara lebih dalam daripada korelasi tahunan. Demokrasi dan pembangunan ekonomi saling berhubungan melalui institusi. Demokrasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan, tetapi juga dapat menghasilkan politik jangka pendek, populisme, dan fragmentasi apabila institusi lemah. Pembangunan dapat memperkuat kelas menengah, pendidikan, dan tuntutan atas akuntabilitas, tetapi pertumbuhan juga dapat meningkatkan konsentrasi sumber daya ekonomi yang kemudian digunakan untuk memengaruhi politik.

Karena itu, fokus analisis bukan mencari jawaban hitam-putih, melainkan memahami kondisi yang membuat demokrasi dan pembangunan saling menguatkan atau justru saling menjauh. Indonesia membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi juga membutuhkan rule of law, kepercayaan, kesempatan yang adil, kebebasan informasi, birokrasi profesional, dan mekanisme koreksi kebijakan. Pembangunan yang mengabaikan kualitas institusi mungkin menghasilkan output dalam jangka pendek, tetapi menumpuk risiko dalam jangka panjang. Sebaliknya, demokrasi yang tidak mampu menghasilkan pelayanan publik, pekerjaan produktif, dan peningkatan kesejahteraan akan kehilangan legitimasi sosialnya.

2. Memahami Demokrasi: Lebih dari Pemilu

Demokrasi sering direduksi menjadi pemilu. Definisi minimalis memang menempatkan kompetisi elektoral sebagai unsur sentral: warga dapat memilih pemimpin dan menggantinya secara damai. Akan tetapi, demokrasi yang hanya memiliki pemilu tanpa kebebasan berpendapat, rule of law, independensi peradilan, perlindungan minoritas, transparansi, dan pembatasan kekuasaan dapat berubah menjadi demokrasi yang dangkal.

Dalam pendekatan yang lebih substantif, demokrasi mencakup beberapa dimensi. Pertama, electoral competition: adanya kontestasi politik yang nyata dan kesempatan yang wajar bagi aktor politik untuk bersaing. Kedua, political participation: warga bukan sekadar pemilih pasif, tetapi dapat berserikat, berorganisasi, menyampaikan aspirasi, dan memengaruhi kebijakan. Ketiga, civil liberties: kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, mengakses informasi, serta kebebasan media. Keempat, horizontal accountability: lembaga negara saling mengawasi sehingga tidak ada pusat kekuasaan yang bekerja tanpa batas. Kelima, rule of law: aturan berlaku relatif setara, prediktabel, dan tidak sepenuhnya ditentukan oleh kepentingan politik.

Bagi pembangunan ekonomi, dimensi-dimensi ini memiliki implikasi langsung. Kebebasan informasi memungkinkan kesalahan kebijakan diketahui lebih cepat. Pers yang independen dapat mengungkap korupsi. Parlemen yang kuat dapat memeriksa anggaran. Peradilan yang independen membantu kepastian kontrak. Pemilu memberi insentif kepada pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan pemilih. Partisipasi masyarakat dapat memperbaiki kualitas informasi lokal dalam pembangunan.

Namun demokrasi juga memiliki biaya transaksi. Proses konsultasi membutuhkan waktu. Kebijakan dapat menghadapi veto dari banyak aktor. Politisi dapat lebih memilih program populer jangka pendek daripada investasi jangka panjang. Koalisi politik dapat menghasilkan transaksi anggaran. Karena itu, demokrasi bukan jaminan otomatis atas kebijakan ekonomi yang baik. Demokrasi hanya menyediakan mekanisme kompetisi, representasi, dan koreksi; kualitas hasil bergantung pada institusi yang mengubah mekanisme tersebut menjadi governance yang efektif.

Dalam konteks Indonesia, pemilu yang rutin dan kompetitif merupakan pencapaian besar. Pergantian kepemimpinan melalui prosedur konstitusional menurunkan risiko konflik kekuasaan yang dahulu menjadi sumber ketidakpastian. Akan tetapi, kualitas demokrasi perlu dinilai pada level yang lebih dalam: seberapa kompetitif akses terhadap kekuasaan, bagaimana pembiayaan politik bekerja, apakah warga dapat mengkritik tanpa ketakutan yang tidak proporsional, apakah pengawasan legislatif efektif, apakah kebijakan publik terbuka terhadap deliberasi, dan apakah institusi hukum dipercaya.

Demokrasi juga perlu dilihat sebagai capability system. Ia memberi masyarakat kapasitas untuk mengoreksi pemerintah. Pemerintah yang salah dapat dikritik, kebijakan dapat diuji di pengadilan, pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban, dan pemilih dapat mengganti elite. Nilai ekonomi demokrasi tidak hanya terletak pada keputusan yang tepat, tetapi pada kemampuan sistem untuk belajar dari kesalahan. Dalam ekonomi modern yang penuh ketidakpastian, kemampuan koreksi ini merupakan aset besar.

Dengan demikian, ketika membahas apakah demokrasi dan pembangunan masih berjalan seiring, kita tidak cukup menanyakan apakah pemilu tetap ada. Pertanyaannya adalah apakah sistem demokrasi masih menghasilkan accountability, policy learning, fair competition, dan confidence yang dibutuhkan oleh pembangunan berkelanjutan.

3. Pembangunan Ekonomi: Lebih Luas daripada Pertumbuhan PDB

Pembangunan ekonomi juga sering disederhanakan menjadi pertumbuhan Produk Domestik Bruto. Pertumbuhan memang sangat penting. Tanpa peningkatan produksi dan produktivitas, sulit memperluas lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, membiayai layanan publik, dan mengurangi kemiskinan. Namun pembangunan adalah konsep yang lebih luas.

Amartya Sen melihat pembangunan sebagai perluasan kebebasan substantif manusia: kemampuan hidup sehat, memperoleh pendidikan, berpartisipasi, bekerja secara produktif, dan menentukan kehidupan yang bernilai. Pendekatan ini menempatkan ekonomi sebagai sarana untuk memperluas capability, bukan sebagai tujuan tunggal. Dengan kerangka ini, pembangunan harus dinilai melalui kombinasi pertumbuhan, pemerataan, kualitas pekerjaan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, kesempatan, lingkungan, dan kebebasan.

Indonesia memperlihatkan kemajuan nyata pada sejumlah indikator. Pertumbuhan ekonomi sekitar lima persen telah berlangsung cukup konsisten. Kemiskinan nasional menurun dalam jangka panjang dan pada Maret 2025 mencapai 8,47 persen. Rasio Gini 0,375 menunjukkan ketimpangan pengeluaran menurun dibanding September 2024. IPM meningkat menjadi 75,90 pada 2025. Data ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak berhenti.

Namun kualitas pembangunan perlu dianalisis melalui struktur pekerjaan dan produktivitas. Bank Dunia menekankan bahwa tantangan Indonesia bukan hanya menciptakan pekerjaan, tetapi menciptakan pekerjaan berproduktivitas tinggi yang mampu menopang standar hidup kelas menengah. Dalam laporan 2025, Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan konsumsi calon kelas menengah relatif lebih lambat dan menekankan kebutuhan reformasi produktivitas. Dalam pembaruan akhir 2025, Bank Dunia juga mencatat bahwa banyak pekerjaan baru tetap terkonsentrasi di sektor dengan nilai tambah rendah dan upah riil menghadapi tekanan.

Ini penting bagi hubungan demokrasi dan pembangunan. Demokrasi dapat bertahan lebih kuat ketika warga merasa memiliki masa depan ekonomi. Bila pertumbuhan tidak menghasilkan mobilitas sosial, kelas menengah dapat menjadi tidak puas. Ketika warga mengalami insecurity meskipun indikator makro terlihat baik, legitimasi institusi dapat menurun. Sebaliknya, pemerintah dapat tergoda menggunakan program jangka pendek, subsidi, atau simbol politik untuk mengatasi ketidakpuasan tanpa menyelesaikan masalah produktivitas.

Pembangunan juga harus memperhitungkan kualitas kelembagaan. Investasi tidak hanya dipengaruhi suku bunga dan infrastruktur, tetapi juga kepastian hukum, stabilitas kebijakan, transparansi, kualitas regulasi, dan kepercayaan. Investor dapat beroperasi dalam sistem politik yang tidak sepenuhnya demokratis, tetapi dalam jangka panjang keputusan investasi yang kompleks membutuhkan prediktabilitas aturan. Rule of law menjadi jembatan penting antara demokrasi dan pembangunan.

Karena itu, hubungan demokrasi–pembangunan harus dilihat melalui pertanyaan yang lebih substantif: apakah pertumbuhan memperluas kesempatan secara adil, apakah hasil pembangunan meningkatkan kapasitas warga untuk berpartisipasi, dan apakah institusi politik mampu mengelola konflik distribusi secara damai dan transparan.

4. Teori Modernisasi: Apakah Pertumbuhan Melahirkan Demokrasi?

Teori modernisasi klasik berargumen bahwa pembangunan ekonomi menciptakan kondisi sosial yang mendukung demokrasi. Ketika pendapatan meningkat, pendidikan membaik, urbanisasi berkembang, dan kelas menengah membesar, masyarakat menjadi lebih kompleks. Warga memiliki lebih banyak sumber daya dan informasi untuk menuntut partisipasi. Struktur sosial menjadi kurang kompatibel dengan pemerintahan yang terlalu tertutup.

Logika tersebut memiliki daya tarik kuat. Kelas menengah yang memiliki aset dan pendidikan cenderung membutuhkan kepastian hukum dan keterwakilan. Dunia usaha membutuhkan aturan yang dapat diprediksi. Profesional membutuhkan kebebasan informasi. Pekerja terdidik lebih sulit dikelola melalui kontrol hierarkis semata. Dengan demikian, modernisasi dapat menciptakan tekanan menuju institusi yang lebih terbuka.

Namun sejarah tidak menunjukkan jalur otomatis. Sejumlah negara mencapai pendapatan tinggi tanpa demokrasi liberal penuh. Sebaliknya, banyak negara miskin mampu mempertahankan pemilu kompetitif. Penelitian modern membedakan antara faktor yang menyebabkan transisi demokrasi dan faktor yang membantu demokrasi bertahan. Pembangunan mungkin tidak selalu menciptakan demokrasi, tetapi dapat meningkatkan peluang survival demokrasi karena konflik distribusi menjadi lebih mudah dikelola pada masyarakat yang lebih makmur.

Indonesia menawarkan pengalaman campuran. Pertumbuhan pada era Orde Baru menciptakan urbanisasi, pendidikan, kelas profesional, media, sektor swasta, dan mahasiswa yang lebih besar. Faktor-faktor ini ikut membentuk kondisi sosial yang kemudian mendukung Reformasi, meskipun krisis ekonomi 1997-1998 menjadi pemicu langsung perubahan politik. Setelah demokratisasi, pertumbuhan terus menciptakan kelas menengah dan konektivitas digital yang lebih besar.

Tetapi modernisasi digital juga menciptakan paradoks. Internet memperluas akses informasi dan mobilisasi, tetapi juga mempercepat disinformasi, polarisasi, surveillance, dan manipulation. Kelas menengah digital tidak otomatis menjadi kekuatan demokratis; preferensinya dapat menekankan stabilitas, efisiensi, dan keamanan jika ketidakpastian ekonomi meningkat. Karena itu, hubungan antara modernisasi dan demokrasi perlu dipahami melalui institusi, bukan hanya pendapatan.

Untuk Indonesia, teori modernisasi tetap relevan tetapi tidak cukup. Pembangunan manusia, pendidikan, dan kelas menengah dapat memperkuat tuntutan akuntabilitas. Namun jika kanal partisipasi dianggap tidak efektif, biaya politik tinggi, dan lembaga pengawasan melemah, modernisasi sosial tidak otomatis menghasilkan penguatan demokrasi. Ia bahkan dapat menghasilkan frustrasi politik yang lebih besar karena ekspektasi warga meningkat lebih cepat daripada kualitas institusi.

5. Demokrasi sebagai Pendorong Pertumbuhan: Mekanisme Institusional

Mengapa demokrasi dapat membantu pembangunan ekonomi? Mekanisme pertama adalah accountability. Pemerintah yang menghadapi pemilu memiliki insentif untuk mempertahankan dukungan publik. Bila pemilih dapat memperoleh informasi yang cukup dan pilihan politik nyata,

kegagalan ekonomi dapat menimbulkan biaya elektoral. Ini mendorong pemerintah memperhatikan inflasi, pekerjaan, pelayanan publik, dan stabilitas.

Mekanisme kedua adalah informasi. Dalam sistem terbuka, pemerintah menerima sinyal dari media, masyarakat sipil, akademisi, oposisi, asosiasi bisnis, dan pemerintah daerah. Kritik sering dipandang tidak nyaman, tetapi secara ekonomi ia dapat berfungsi sebagai early warning system. Kebijakan yang merugikan dapat diketahui sebelum kerusakan menjadi besar.

Mekanisme ketiga adalah rule of law dan constraints on executive power. Demokrasi yang matang biasanya disertai pembatasan kekuasaan yang meningkatkan prediktabilitas. Pelaku ekonomi membutuhkan kepastian bahwa kontrak dan hak tidak dapat diubah secara sewenang-wenang. Acemoglu dan Robinson menekankan pentingnya institusi inklusif yang mendistribusikan kekuasaan dan kesempatan lebih luas.

Mekanisme keempat adalah peaceful conflict resolution. Pembangunan selalu menghasilkan pemenang dan pihak yang harus menyesuaikan diri. Industrialisasi mengubah struktur pekerjaan, urbanisasi mengubah harga tanah, hilirisasi mengubah relasi pusat-daerah, dan transisi energi menciptakan industri baru sambil mengurangi yang lama. Demokrasi menyediakan prosedur untuk mengelola konflik tersebut tanpa kekerasan.

Mekanisme kelima adalah public goods. Pemilu dapat mendorong pemerintah memperluas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial karena manfaatnya dirasakan kelompok besar. Program semacam itu meningkatkan human capital dan produktivitas jangka panjang.

Namun semua mekanisme tersebut memiliki syarat. Accountability membutuhkan informasi yang bebas dan pemilih yang memiliki pilihan. Rule of law membutuhkan peradilan dan penegakan hukum. Peaceful conflict resolution membutuhkan kepercayaan terhadap prosedur. Public goods membutuhkan birokrasi yang mampu melaksanakan. Dengan kata lain, demokrasi electoral tanpa state capacity tidak otomatis menghasilkan pembangunan.

Dalam kasus Indonesia, demokrasi telah membantu memperluas perhatian pemerintah pada pelayanan publik dan bantuan sosial. Desentralisasi membuka kompetisi inovasi antar-daerah. Pemilu lokal memberi insentif bagi kepala daerah untuk menunjukkan hasil. Namun desentralisasi juga dapat memindahkan praktik patronase dan korupsi ke tingkat lokal. Ini menunjukkan bahwa demokratisasi perlu disertai pembangunan kapasitas institusi.

6. Argumen Sebaliknya: Apakah Demokrasi Menghambat Kecepatan Pembangunan?

Pendukung developmental authoritarianism sering mengemukakan bahwa pemerintah yang lebih terkonsentrasi dapat bertindak cepat, menjaga kesinambungan kebijakan, menghindari veto politik, mengendalikan konflik distributif, dan memobilisasi investasi besar. Beberapa keberhasilan Asia Timur pada abad ke-20 sering digunakan sebagai contoh.

Argumen ini memiliki sebagian kebenaran: proses demokratis memang dapat lebih lambat. Infrastruktur besar membutuhkan konsultasi, pembebasan lahan, izin, dan pengawasan. Kebijakan

reformasi dapat ditunda karena tidak populer. Namun kecepatan keputusan tidak sama dengan kualitas keputusan. Sistem yang sangat terkonsentrasi dapat mengeksekusi kebijakan baik dengan cepat, tetapi juga dapat mengeksekusi kebijakan buruk dengan cepat dan tanpa mekanisme koreksi.

Selain itu, keberhasilan negara pembangunan di Asia tidak hanya ditentukan oleh otoritarianisme, tetapi oleh birokrasi berkualitas tinggi, investasi pendidikan, disiplin kebijakan industri, kemampuan belajar, dan integrasi pasar global. Banyak rezim non-demokratis lain justru gagal karena korupsi, rent seeking, konflik internal, dan keputusan personalistik.

Bagi Indonesia, nostalgia terhadap “kecepatan” perlu dievaluasi dengan hati-hati. Era Orde Baru menghasilkan pertumbuhan dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga menciptakan konsentrasi kekuasaan, korupsi sistemik, ketergantungan tertentu, dan kerentanan yang terlihat saat krisis 1997-1998. Reformasi tidak menghapus semua masalah, tetapi menciptakan lebih banyak kanal koreksi.

Tantangan demokrasi Indonesia adalah bagaimana mempertahankan deliberasi tanpa mengalami decision paralysis. Jawabannya bukan mengurangi demokrasi, melainkan memperbaiki governance: digitalisasi perizinan, penyederhanaan regulasi, profesionalisasi birokrasi, transparansi data, koordinasi pusat-daerah, dan desain konsultasi yang efisien.

Dalam ekonomi kompleks, kualitas keputusan semakin membutuhkan distributed intelligence. Pemerintah tidak mungkin mengetahui semua informasi yang tersebar di masyarakat. Demokrasi yang sehat dapat menjadi sistem pengumpulan informasi. Konsultasi bukan semata hambatan; ia dapat mengurangi policy error, konflik implementasi, dan biaya litigasi di masa depan.

Karena itu, trade-off antara demokrasi dan efisiensi bukan hukum alam. Ia sangat bergantung pada desain institusi. Demokrasi yang buruk bisa lamban dan transaksional; otoritarianisme yang buruk bisa cepat tetapi salah. Tujuan reformasi institusional adalah menciptakan demokrasi yang sekaligus accountable dan capable.

7. Indonesia Pasca-Reformasi: Demokratisasi di Tengah Rekonstruksi Ekonomi

Reformasi 1998 terjadi pada saat ekonomi Indonesia mengalami krisis terdalam sejak kemerdekaan. Nilai tukar runtuh, perbankan bermasalah, banyak perusahaan gagal, kemiskinan meningkat, dan legitimasi politik merosot. Secara teori, transisi politik dalam kondisi ekonomi seperti itu sangat berisiko. Indonesia menghadapi desentralisasi, konflik di sejumlah wilayah, perubahan konstitusi, restrukturisasi perbankan, dan pembentukan institusi baru secara hampir bersamaan.

Keberhasilan Indonesia melewati fase tersebut tanpa kembali secara penuh ke otoritarianisme merupakan pencapaian historis. Pemilu 1999, perubahan konstitusi, pemilihan presiden langsung, pembentukan Mahkamah Konstitusi, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi pada periode awal, kebebasan pers, dan otonomi daerah mengubah struktur kekuasaan.

Dari sisi ekonomi, stabilitas makro secara bertahap pulih. Reformasi perbankan dan fiskal memperkuat fondasi. Rasio utang pemerintah yang tinggi setelah krisis dapat diturunkan. Indonesia kemudian menikmati pertumbuhan yang didukung komoditas, konsumsi domestik, investasi, dan ekspansi kelas menengah.

Hubungan antara demokrasi dan ekonomi pada periode ini cukup positif. Demokrasi memberikan legitimasi kepada reformasi, sementara perbaikan ekonomi membantu demokrasi bertahan. Akan tetapi, proses tersebut juga memunculkan institusi informal seperti politik biaya tinggi, patronase, oligarki lokal, dan transaksi koalisi. Demokrasi membuka kompetisi, tetapi kompetisi membutuhkan sumber daya. Ketika pembiayaan politik tidak transparan, kepentingan ekonomi dapat memperoleh pengaruh besar.

Dengan demikian, Reformasi tidak menciptakan garis lurus dari demokrasi menuju good governance. Ia menciptakan arena baru di mana institusi formal demokratis berinteraksi dengan struktur ekonomi dan kekuasaan lama. Ini penting untuk memahami kondisi sekarang: kualitas demokrasi tidak hanya bergantung pada aturan pemilu, tetapi pada siapa yang memiliki sumber daya untuk berkompetisi, bagaimana media dimiliki, bagaimana partai dibiayai, dan seberapa kuat lembaga pengawasan.

Pembangunan ekonomi pasca-Reformasi juga tidak homogen. Daerah tertentu menikmati investasi dan industrialisasi, daerah lain tertinggal. Desentralisasi memberi ruang inovasi, tetapi kapasitas fiskal dan administratif berbeda. Oleh karena itu, evaluasi demokrasi-pembangunan harus memperhatikan variasi regional.

8. Kondisi Ekonomi Indonesia 2025: Stabil, tetapi Belum Cukup Transformasional

Menurut BPS, perekonomian Indonesia tumbuh 5,11 persen pada 2025. Angka ini menunjukkan ketahanan yang signifikan di tengah ketidakpastian global. PDB nominal mencapai Rp23.821,1 triliun dan PDB per kapita sekitar Rp83,7 juta. Pada triwulan IV 2025 pertumbuhan year-on-year mencapai 5,39 persen. Jawa tetap mendominasi struktur ekonomi dengan kontribusi 56,93 persen.

Secara makro, capaian tersebut penting. Stabilitas pertumbuhan memberi ruang fiskal dan menjaga kepercayaan. Akan tetapi, pertumbuhan sekitar lima persen juga memunculkan pertanyaan apakah cukup untuk mencapai aspirasi pendapatan tinggi dalam jangka panjang. Bank Dunia pada Juni 2025 memproyeksikan rata-rata pertumbuhan 4,8 persen untuk 2025-2027 dan menekankan perlunya reformasi produktivitas.

Masalah produktivitas memiliki dimensi demokrasi. Reformasi produktivitas sering membutuhkan perubahan regulasi, kompetisi pasar, peningkatan kualitas pendidikan, reformasi BUMN, penegakan persaingan, dan transparansi. Kelompok yang menikmati rente dari status quo dapat menolak perubahan. Demokrasi dapat membantu karena konflik kepentingan menjadi terlihat, tetapi dapat pula menghambat jika elite ekonomi memiliki pengaruh yang terlalu besar dalam proses kebijakan.

Struktur pertumbuhan juga penting. Bila pertumbuhan berasal dari sektor padat modal yang menciptakan sedikit pekerjaan berkualitas, masyarakat dapat merasa tidak menikmati kemajuan. Hilirisasi sumber daya alam, misalnya, dapat meningkatkan investasi dan ekspor, tetapi manfaatnya bergantung pada local linkages, kualitas pekerjaan, penerimaan daerah, lingkungan, dan transfer teknologi.

Ekonomi Indonesia membutuhkan transformasi dari growth based on accumulation menuju growth based on productivity and innovation. Transformasi tersebut membutuhkan institusi: perlindungan

hak, kompetisi, pendidikan, riset, keterbukaan informasi, dan kebijakan yang dapat dievaluasi. Demokrasi yang sehat dapat memberi fondasi, tetapi hanya bila tidak ditangkap oleh vested interests.

Karena itu, stabilitas ekonomi 2025 tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa hubungan demokrasi dan pembangunan baik-baik saja. Pertanyaan lebih penting adalah apakah struktur politik mendukung reformasi yang diperlukan untuk pertumbuhan berikutnya.

9. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Legitimasi Demokrasi

BPS mencatat tingkat kemiskinan Maret 2025 sebesar 8,47 persen atau sekitar 23,85 juta orang, turun dibanding periode sebelumnya. Kemiskinan ekstrem juga menurun menjadi 0,85 persen. Rasio Gini turun menjadi 0,375. Ini merupakan kemajuan yang patut dicatat.

Namun angka nasional menyembunyikan variasi besar. Kemiskinan perdesaan 11,03 persen, jauh di atas perkotaan 6,73 persen. Beberapa provinsi memiliki tingkat kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional. Ketimpangan perkotaan juga lebih tinggi daripada perdesaan. Perbedaan regional dan urban-rural memengaruhi pengalaman warga terhadap pembangunan.

Hubungan antara ketimpangan dan demokrasi kompleks. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat berubah menjadi ketimpangan politik karena kelompok kaya memiliki akses lebih besar terhadap media, pembiayaan politik, jaringan, dan lobbying. Dalam kondisi seperti itu, prinsip one person one vote dapat berdampingan dengan one rupiah many influences. Demokrasi secara formal setara tetapi pengaruh aktual tidak setara.

Sebaliknya, demokrasi dapat mendorong redistribusi melalui pajak, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik. Namun redistribusi yang terlalu berorientasi pada transfer jangka pendek tanpa peningkatan produktivitas dapat menciptakan ketergantungan fiskal dan tidak menyelesaikan akar masalah.

Bagi Indonesia, agenda penting adalah equality of opportunity. Pembangunan yang demokratis tidak harus menghasilkan kesamaan pendapatan, tetapi harus mencegah kesempatan hidup terlalu ditentukan oleh tempat lahir, status keluarga, akses politik, atau kedekatan dengan kekuasaan. Pendidikan berkualitas, kesehatan, infrastruktur dasar, akses digital, hukum yang setara, dan kompetisi usaha menjadi instrumen utama.

Legitimasi demokrasi sangat dipengaruhi perceived fairness. Warga mungkin menerima ketimpangan tertentu jika percaya sistem memberi kesempatan. Tetapi bila ketimpangan dipandang lahir dari privilege dan koneksi, kepercayaan pada institusi dapat menurun. Karena itu, perang melawan korupsi dan nepotisme adalah bagian dari kebijakan pembangunan, bukan hanya isu moral.

10. Kelas Menengah dan Demokrasi: Penopang atau Kelompok yang Rentan?

Kelas menengah sering dianggap fondasi demokrasi karena memiliki pendidikan, aset, dan kebutuhan terhadap stabilitas hukum. Dalam teori modernisasi, kelas menengah mendorong

pluralisme. Namun kelas menengah juga dapat bersikap ambivalen. Ketika menghadapi insecurity, mereka dapat lebih mengutamakan stabilitas dan efisiensi daripada kebebasan politik.

Indonesia mengalami ekspansi kelompok aspiring middle class dan kelas konsumsi selama dua dekade. Namun Bank Dunia menekankan kualitas pekerjaan sebagai tantangan. Banyak pekerjaan belum menghasilkan upah dan perlindungan yang cukup untuk mempertahankan standar hidup kelas menengah. Ketika harga perumahan, pendidikan, kesehatan, dan mobilitas meningkat lebih cepat daripada pendapatan, masyarakat dapat mengalami middle-class squeeze.

Situasi ini memiliki konsekuensi politik. Kelas menengah yang merasa rentan dapat menuntut hasil cepat. Mereka dapat kehilangan kesabaran terhadap proses deliberatif yang dianggap lambat. Narasi “yang penting ekonomi tumbuh” dapat menjadi lebih menarik. Namun apabila demokrasi kehilangan dukungan kelas menengah, mekanisme kontrol dapat melemah.

Di sisi lain, kelas menengah digital Indonesia sangat aktif dalam ruang publik. Media sosial dapat menjadi alat pengawasan dan mobilisasi. Tetapi algoritma platform juga mendorong polarisasi dan sensationalism. Tantangannya adalah mengubah energi digital menjadi deliberasi yang berbasis bukti.

Pembangunan ekonomi yang memperkuat demokrasi harus menciptakan upward mobility yang nyata. Pekerjaan produktif, kesempatan kewirausahaan, perlindungan sosial adaptif, pendidikan yang relevan, dan akses perumahan menjadi agenda politik demokratis sekaligus ekonomi.

Jika kelas menengah merasa bahwa sistem ekonomi kompetitif dan adil, mereka cenderung menjadi pendukung rule of law. Bila mereka melihat mobilitas bergantung koneksi, dukungan pada institusi dapat melemah. Dengan demikian, masa depan demokrasi Indonesia sangat terkait dengan kemampuan ekonomi menciptakan middle-class security.

11. Korupsi, Rent Seeking, dan Political Capture

Korupsi adalah titik pertemuan paling jelas antara kualitas demokrasi dan pembangunan. Dari perspektif ekonomi, korupsi meningkatkan biaya transaksi, menciptakan ketidakpastian, menurunkan kualitas investasi publik, dan mengalihkan sumber daya dari aktivitas produktif menuju rent seeking. Dari perspektif demokrasi, korupsi merusak equality of political influence dan kepercayaan publik.

Dalam sistem demokrasi dengan biaya politik tinggi, risiko political capture meningkat. Kandidat membutuhkan sumber daya untuk kampanye, organisasi partai membutuhkan pendanaan, dan koalisi membutuhkan negosiasi. Jika pembiayaan tidak transparan dan mekanisme pengawasan lemah, donor ekonomi dapat memperoleh akses kebijakan.

Masalah ini tidak berarti demokrasi menyebabkan korupsi. Korupsi juga dapat sangat tinggi dalam rezim non-demokratis dan lebih sulit diketahui karena media serta oposisi dibatasi. Demokrasi justru menyediakan instrumen pengungkapan. Namun keberadaan instrumen tidak otomatis menjamin efektivitas.

Bagi pembangunan Indonesia, agenda antikorupsi perlu bergerak dari penindakan ke prevention architecture. Digital procurement, beneficial ownership transparency, e-budgeting, audit berbasis

data, keterbukaan kontrak, conflict-of-interest regulation, whistleblower protection, dan reformasi pembiayaan politik penting.

Korupsi juga harus dilihat sebagai masalah market structure. Ketika izin dan proyek ditentukan oleh discretion tinggi, perusahaan akan berinvestasi dalam hubungan politik. Reformasi regulasi yang mengurangi discretionary rents dapat memperbaiki governance sekaligus produktivitas.

Dalam jangka panjang, demokrasi dan pembangunan hanya berjalan seiring jika kompetisi politik tidak terlalu bergantung pada konsentrasi kekayaan. Reformasi pembiayaan partai, transparansi lobbying, keterbukaan aset, dan pengawasan konflik kepentingan adalah agenda ekonomi politik yang fundamental.

12. Rule of Law sebagai Jembatan Utama

Banyak penelitian menemukan bahwa hubungan antara demokrasi dan pertumbuhan sangat bergantung pada kualitas institusi, terutama rule of law. Helliwell dan peneliti lain menunjukkan bahwa demokrasi dapat bekerja melalui pendidikan, stabilitas, dan institusi. Rigobon dan Rodrik menekankan interaksi kompleks antar-institusi. Penelitian tentang kualitas institusional juga menunjukkan bahwa rule of law merupakan determinan penting pertumbuhan.

Rule of law berarti lebih dari banyaknya peraturan. Ia membutuhkan aturan yang jelas, penerapan yang relatif konsisten, proses yang dapat diprediksi, dan kesempatan untuk menggugat keputusan. Bagi dunia usaha, kepastian tersebut mengurangi risk premium. Bagi warga, ia membatasi penyalahgunaan kekuasaan.

Indonesia telah melakukan banyak reformasi regulasi, tetapi masih menghadapi problem regulatory complexity, overlapping authority, enforcement inconsistency, dan legal uncertainty. Upaya penyederhanaan regulasi dapat membantu investasi, tetapi harus dilakukan tanpa mengurangi mekanisme checks and balances.

Trade-off antara speed dan legality sering disalahpahami. Kepastian prosedur justru dapat mempercepat investasi jika sejak awal aturan jelas. Yang memperlambat adalah ketidakpastian, perubahan mendadak, dan konflik kewenangan.

Rule of law juga penting bagi inovasi. Startup, investor, dan perusahaan teknologi membutuhkan kepastian intellectual property, data governance, competition policy, dan dispute resolution. Ekonomi berbasis pengetahuan lebih sensitif terhadap kualitas institusi daripada ekonomi yang hanya mengeksploitasi sumber daya.

Karena itu, jika Indonesia ingin keluar dari middle-income trap, penguatan rule of law bukan agenda politik yang terpisah dari ekonomi. Ia adalah infrastructure of trust.

13. Desentralisasi: Demokrasi Lokal dan Kualitas Pembangunan

Desentralisasi setelah Reformasi merupakan salah satu eksperimen governance terbesar di dunia. Pemerintah daerah memperoleh kewenangan dan anggaran lebih besar, sementara kepala daerah

dipilih langsung. Tujuannya mendekatkan keputusan kepada warga dan menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan lokal.

Secara positif, desentralisasi menciptakan policy laboratories. Beberapa daerah berhasil melakukan inovasi pelayanan, perizinan, kesehatan, pendidikan, dan digital government. Pemimpin lokal yang berhasil dapat memperoleh legitimasi elektoral melalui kinerja.

Namun desentralisasi juga menciptakan risiko local capture. Elite lokal dapat menguasai anggaran, perizinan, dan sumber daya. Kapasitas birokrasi berbeda antar-daerah. Daerah dengan pendapatan tinggi belum tentu memiliki governance terbaik.

Hubungan demokrasi–pembangunan di Indonesia karena itu sangat spatial. Warga dapat mengalami kualitas demokrasi dan pelayanan publik yang berbeda meskipun berada dalam negara yang sama. Indeks Demokrasi Indonesia juga menunjukkan variasi antarprovinsi.

Agenda ke depan adalah memperkuat fiscal accountability, open data, merit system, digital procurement, dan citizen feedback di tingkat daerah. Transfer fiskal seharusnya memberi insentif pada outcome, bukan hanya spending.

Desentralisasi juga penting bagi hilirisasi dan proyek besar. Daerah penghasil harus merasakan manfaat melalui pekerjaan, infrastruktur, lingkungan yang terjaga, dan peningkatan kapasitas lokal. Jika manfaat terkonsentrasi, konflik center-periphery dapat meningkat.

14. Kebebasan Pers, Informasi, dan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

Dalam ekonomi industri lama, kebebasan informasi mungkin dipandang terutama sebagai isu politik. Dalam ekonomi digital dan inovasi, informasi adalah faktor produksi. Pengetahuan berkembang melalui kritik, eksperimen, dan pertukaran ide.

Pers yang bebas berfungsi sebagai sistem monitoring. Ia dapat mengungkap kegagalan proyek, konflik kepentingan, risiko lingkungan, dan penyimpangan. Kritik yang akurat memungkinkan policy correction. Menekan informasi buruk mungkin menjaga citra jangka pendek, tetapi meningkatkan risiko kesalahan berulang.

Freedom House pada 2025 menilai Indonesia sebagai Partly Free dan mencatat tantangan pada kebebasan sipil serta penggunaan hukum tertentu terhadap ekspresi. Freedom on the Net memberi skor 48/100 dan mencatat penurunan kecil kebebasan internet. Indikator tersebut merupakan penilaian eksternal dan dapat diperdebatkan, tetapi relevan sebagai sinyal risiko bagi information ecosystem.

Ekonomi berbasis inovasi membutuhkan intellectual freedom. Universitas, think tank, jurnalis, dan entrepreneur harus dapat menguji asumsi. Jika kritik kebijakan selalu dipersepsikan sebagai ancaman, quality of decision-making menurun.

Kebebasan juga harus disertai responsibility. Disinformasi dan ujaran kebencian adalah masalah nyata. Tantangannya adalah membangun regulasi yang narrowly tailored, transparan, subject to judicial review, dan tidak menciptakan chilling effect berlebihan.

Demokrasi digital Indonesia akan menjadi salah satu penentu apakah pembangunan masa depan bersifat knowledge-driven atau sekadar infrastructure-driven.

15. Pemilu, Populisme, dan Kebijakan Jangka Pendek

Pemilu menciptakan accountability, tetapi juga electoral cycles. Pemerintah dapat terdorong meningkatkan belanja populer menjelang pemilu, menunda reformasi yang menyakitkan, atau memilih proyek yang visible dibanding reformasi institusional yang manfaatnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian.

Populisme ekonomi muncul ketika kebijakan kompleks disederhanakan menjadi solusi cepat tanpa memperhatikan biaya fiskal atau opportunity cost. Namun tidak semua program populer adalah populisme. Bantuan sosial, subsidi terarah, dan investasi publik dapat sangat rasional bila didesain baik.

Kuncinya adalah fiscal institutions. Aturan fiskal, transparansi anggaran, evaluasi kebijakan, dan lembaga audit membantu demokrasi menghindari short-termism. Indonesia memiliki pengalaman menjaga disiplin fiskal yang cukup baik dibanding banyak negara.

Pembangunan jangka panjang membutuhkan investasi pendidikan, kesehatan, riset, climate adaptation, dan produktivitas. Manfaat politiknya sering tidak langsung. Sistem demokrasi perlu menciptakan bipartisan or cross-coalition commitment terhadap agenda tersebut.

Di sinilah technocracy dan democracy harus bekerja bersama. Teknokrat menyediakan evidence dan desain; politisi menyediakan legitimasi dan pilihan nilai. Teknokrasi tanpa demokrasi berisiko tidak responsif; demokrasi tanpa kapasitas teknis berisiko menghasilkan kebijakan buruk.

Indonesia membutuhkan institutionalized policy evaluation agar program besar dinilai berdasarkan outcome, bukan hanya narasi. Keterbukaan hasil evaluasi merupakan mekanisme demokratis sekaligus manajerial.

16. Investasi, Kepastian Kebijakan, dan Kualitas Demokrasi

Investasi membutuhkan stabilitas. Namun stabilitas yang dicari investor bukan hanya stabilitas politik dalam arti tidak adanya demonstrasi atau pergantian pemerintah. Yang lebih penting adalah policy predictability, contract enforcement, dan credible commitment.

Demokrasi yang matang dapat menyediakan credible commitment karena kebijakan tidak sepenuhnya bergantung pada satu individu. Institusi membuat perubahan kekuasaan tidak otomatis mengubah semua aturan. Sebaliknya, personalistic stability dapat terlihat kuat tetapi memiliki succession risk.

Indonesia relatif berhasil menjaga continuity pada sejumlah kebijakan strategis lintas pemerintahan. Namun investor juga memperhatikan regulatory uncertainty, perizinan, hukum, kepastian pajak, dan koordinasi pusat-daerah.

Peningkatan investasi tidak boleh dinilai hanya dari nilai modal masuk. Development quality bergantung pada spillovers: transfer teknologi, local supplier development, pekerjaan, skill, dan lingkungan.

Demokrasi berperan memastikan bahwa investasi besar memiliki social license. Konsultasi masyarakat, environmental assessment, dan transparansi bukan sekadar hambatan, tetapi dapat mencegah konflik yang mahal.

Dengan demikian, good investment climate dan demokrasi bukan lawan. Keduanya bertemu pada predictable governance.

17. Hilirisasi, Industrialisasi, dan Politik Distribusi

Hilirisasi menjadi strategi utama Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam. Secara ekonomi, logikanya kuat: jangan hanya mengeksport bahan mentah, tetapi bangun smelter, manufaktur, dan rantai nilai domestik.

Namun hilirisasi juga merupakan proyek politik distribusi. Siapa memperoleh keuntungan? Negara melalui pajak dan devisa, investor melalui return, daerah melalui pekerjaan dan pendapatan, atau masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan? Pertanyaan distribusi menentukan legitimasi.

Demokrasi diperlukan untuk memastikan transparansi kontrak, perlindungan lingkungan, hak masyarakat lokal, dan evaluasi insentif fiskal. Tanpa accountability, kebijakan industri dapat berubah menjadi rent allocation.

Pada saat yang sama, industrial policy membutuhkan kecepatan dan koordinasi. Karena itu, bukan demokrasi versus industrial policy, tetapi bagaimana membuat industrial policy yang transparan, measurable, dan time-bound.

Indonesia perlu menilai hilirisasi berdasarkan productivity spillover, bukan hanya tonase produksi. Apakah industri membangun supplier lokal? Apakah skill meningkat? Apakah R&D tumbuh? Apakah energi makin bersih? Apakah daerah memperoleh manfaat?

Jika hilirisasi menghasilkan pertumbuhan yang inklusif dan transparan, ia dapat memperkuat legitimasi demokrasi. Jika manfaat terkonsentrasi, ia dapat memperbesar political-economic concentration.

18. State Capacity: Demokrasi Tidak Dapat Menggantikan Negara yang Efektif

Salah satu kesalahan dalam debat demokrasi adalah menganggap bahwa demokrasi sendiri dapat menyelesaikan semua masalah. Demokrasi menentukan bagaimana kekuasaan diperoleh dan dibatasi, tetapi pembangunan membutuhkan state capacity: kemampuan memungut pajak, menegakkan hukum, membangun infrastruktur, memberikan pelayanan, dan mengimplementasikan kebijakan.

Negara dengan pemilu baik tetapi birokrasi lemah dapat gagal memberi layanan. Sebaliknya, birokrasi kuat tanpa accountability dapat menjadi efektif namun tidak responsif. Model ideal adalah capable democracy.

Indonesia telah memperbaiki kapasitas negara melalui digitalisasi, reformasi administrasi, dan peningkatan sistem fiskal. Namun variasi kualitas masih besar. Meritocracy dalam birokrasi, data interoperability, procurement, dan policy coordination tetap perlu diperkuat.

State capacity juga menentukan kualitas program sosial. Demokrasi menciptakan demand agar pemerintah membantu warga; capacity memastikan bantuan tepat sasaran. Data sosial yang akurat, integrasi identitas, dan mekanisme grievance merupakan contoh infrastruktur administratif.

Dalam era krisis iklim, pandemi, dan disrupsi digital, state capacity semakin penting. Pemerintah harus mampu merespons cepat tanpa kehilangan accountability. Emergency power perlu batas waktu dan oversight.

Karena itu, pembangunan demokrasi Indonesia harus bergeser dari sekadar electoral democracy menuju institutional democracy yang memiliki birokrasi profesional dan dapat diawasi.

19. Indeks Demokrasi: Mengapa Hasilnya Berbeda?

Pada 2025, beberapa indikator demokrasi memberi gambaran yang tidak identik. BPS melaporkan Indeks Demokrasi Indonesia 2025 sebesar 78,19 dan kategori sedang. Freedom House memberi skor 56/100 untuk Freedom in the World 2025 dan status Partly Free. V-Dem Democracy Report 2026 mengklasifikasikan Indonesia pada 2025 sebagai electoral autocracy plus.

Perbedaan ini bukan otomatis berarti salah satu benar dan yang lain salah. Mereka mengukur konsep berbeda. IDI merupakan indikator nasional yang dibangun dengan metodologi dan dimensi tertentu untuk evaluasi pembangunan politik. Freedom House menilai political rights dan civil liberties. V-Dem menggunakan dataset expert-coded yang mengukur banyak dimensi demokrasi dan memiliki klasifikasi regime.

Karena itu, angka tidak boleh dipakai sebagai slogan politik. Pendekatan akademik perlu memeriksa definisi, indikator, sumber data, dan uncertainty. Namun bila beberapa sistem berbeda menunjukkan area tekanan pada kebebasan, institutional constraints, atau kualitas kompetisi, sinyal tersebut layak diperhatikan.

Indeks sebaiknya digunakan sebagai diagnostic tool. Pertanyaan yang lebih penting adalah komponen mana yang melemah dan apa dampaknya terhadap governance. Misalnya, jika kebebasan informasi turun, dampak ekonomi mungkin muncul melalui kualitas policy feedback. Jika checks and balances melemah, risiko discretionary policy meningkat.

Demokrasi sulit diukur karena memiliki dimensi kualitatif. Namun ketidaksempurnaan pengukuran bukan alasan untuk mengabaikan indikator. Sebaliknya, triangulasi menjadi penting.

20. Apakah Pertumbuhan Dapat Berlanjut Ketika Demokrasi Melemah?

Secara empiris, jawabannya adalah ya, setidaknya untuk periode tertentu. Banyak negara menunjukkan pertumbuhan tinggi tanpa demokrasi penuh. Pertumbuhan dapat didorong investasi, urbanisasi, demografi, komoditas, teknologi, atau integrasi global.

Namun pertanyaan jangka panjang berbeda. Ketika ekonomi menjadi lebih kompleks, kualitas institusi semakin penting. Innovation economy membutuhkan eksperimen, kebebasan ide, perlindungan hak, dan kompetisi. Knowledge workers lebih sulit dikelola melalui struktur sangat hierarkis.

Democratic backsliding dapat menimbulkan risiko ekonomi melalui tiga jalur. Pertama, concentration of discretion meningkatkan uncertainty dan rent seeking. Kedua, melemahnya feedback memperbesar risiko policy error. Ketiga, political polarization dapat menurunkan trust.

Tetapi tidak semua penurunan skor demokrasi langsung tercermin pada PDB. Ada lag. Institusi dapat mengalami erosi sementara ekonomi tetap menikmati momentum investasi sebelumnya. Karena itu, pertumbuhan saat ini bukan bukti bahwa kualitas institusi tidak penting.

Analogi manajemen adalah perusahaan yang laba saat ini tinggi tetapi governance memburuk. Laba tidak otomatis berarti sistem governance sehat. Risiko baru terlihat ketika terjadi shock.

Bagi Indonesia, fokus harus pada institutional resilience. Apakah sistem mampu mengoreksi kebijakan, menahan abuse, dan mempertahankan confidence ketika menghadapi krisis berikutnya?

21. Demokrasi, Inovasi, dan Ekonomi Digital

Indonesia bercita-cita menjadi kekuatan ekonomi digital. Digital economy membutuhkan infrastruktur, modal, skill, data, dan entrepreneurship. Tetapi juga membutuhkan open information environment.

Inovasi lahir dari dissent terhadap cara lama. Dalam organisasi, psychological safety memungkinkan karyawan mengemukakan ide. Pada tingkat negara, democratic openness memiliki fungsi serupa: memungkinkan kritik terhadap kebijakan dan dominant assumptions.

AI dan big data memperbesar kemampuan negara dan perusahaan, tetapi juga risiko surveillance. Pembangunan digital yang demokratis membutuhkan data protection, algorithmic accountability, cybersecurity, dan due process.

Ekonomi digital juga menciptakan market concentration. Platform besar memiliki data dan network effects. Competition policy menjadi penting agar inovasi tidak terhambat.

Demokrasi digital membutuhkan literasi media. Disinformasi dapat mengurangi kualitas pilihan politik. Pemerintah, platform, universitas, dan masyarakat sipil perlu membangun information resilience tanpa menjadikan fact-checking sebagai alat kontrol politik.

Jika Indonesia mampu menggabungkan digital innovation dengan rights-respecting governance, demokrasi dapat menjadi competitive advantage bagi ekonomi pengetahuan.

22. Generasi Muda, Pendidikan, dan Kontrak Sosial Baru

Generasi muda Indonesia akan menentukan hubungan demokrasi dan pembangunan. Mereka lebih terhubung digital, lebih berpendidikan, tetapi menghadapi pasar kerja yang berubah cepat. AI, automation, dan platform work mengubah pola karier.

Kontrak sosial lama—pendidikan, memperoleh pekerjaan stabil, kemudian naik kelas—menjadi kurang pasti. Jika pendidikan tidak menghasilkan employability, frustrasi meningkat. Demokrasi harus mampu merespons melalui reskilling, vocational reform, lifelong learning, dan job creation.

Generasi muda juga memiliki ekspektasi tinggi terhadap transparency. Mereka terbiasa memperoleh informasi cepat dan membandingkan pengalaman. Birokrasi yang lambat dan opaque lebih mudah kehilangan legitimasi.

Namun digital engagement bukan otomatis civic engagement. Pendidikan kewargaan perlu mengembangkan critical thinking, data literacy, dan kemampuan berdialog dengan perbedaan.

Universitas memiliki peran penting sebagai ruang aman untuk inquiry. Kebebasan akademik mendukung inovasi dan demokrasi sekaligus. Kampus yang hanya mengajarkan compliance akan sulit menghasilkan entrepreneur dan ilmuwan kreatif.

Pembangunan ekonomi Indonesia 2045 memerlukan generasi yang produktif dan warga yang mampu menjaga institusi. Keduanya harus dibentuk bersama.

23. Lingkungan, Transisi Energi, dan Demokrasi Antar-Generasi

Pembangunan ekonomi tidak dapat lagi dipisahkan dari sustainability. Indonesia menghadapi perubahan iklim, degradasi ekosistem, risiko bencana, dan kebutuhan transisi energi.

Demokrasi memberikan suara kepada warga saat ini, tetapi generasi mendatang belum memiliki suara elektoral. Karena itu, kebijakan iklim memerlukan institutions of long-termism: target hukum, scientific advisory, transparansi, dan evaluasi.

Proyek energi dan pertambangan sering menimbulkan konflik distribusi lokal. Demokrasi memungkinkan masyarakat terdampak berpartisipasi, tetapi proses partisipasi harus bermakna, bukan formalitas.

Transisi energi juga memiliki biaya. Pekerja di sektor lama memerlukan just transition. Tanpa kompensasi dan reskilling, kebijakan hijau dapat menghadapi backlash.

Pembangunan demokratis harus memperluas konsep accountability dari pemilih hari ini menuju generasi masa depan. Ini adalah bentuk intergenerational governance.

24. Skenario Indonesia 2030-2045

Ada beberapa skenario. Skenario pertama adalah virtuous cycle: demokrasi menguat, rule of law membaik, investasi meningkat, produktivitas tumbuh, pekerjaan berkualitas bertambah, kelas menengah menguat, dan dukungan terhadap demokrasi meningkat.

Skenario kedua adalah growth without deepening democracy. Ekonomi tumbuh cukup baik karena investasi dan komoditas, tetapi checks and balances melemah. Dalam jangka menengah sistem tampak stabil, namun rent seeking dan policy risk meningkat.

Skenario ketiga adalah democratic frustration. Pemilu tetap kompetitif tetapi ekonomi gagal menciptakan pekerjaan berkualitas. Ketidakpuasan meningkat dan populisme menguat.

Skenario keempat adalah institutional reform under pressure: shock ekonomi atau geopolitik memaksa reformasi governance dan produktivitas. Hasilnya bergantung pada kemampuan elite membangun consensus.

Indonesia sebaiknya secara sadar memilih virtuous cycle. Itu membutuhkan reformasi politik dan ekonomi yang saling melengkapi, bukan diperlakukan terpisah.

Target Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan PDB besar. Negara berpendapatan tinggi membutuhkan institusi berkapasitas tinggi, masyarakat berpendidikan, dan tingkat trust yang memadai.

25. Agenda Kebijakan: Membuat Demokrasi dan Pembangunan Kembali Saling Memperkuat

Pertama, memperkuat rule of law dan kepastian regulasi. Kedua, reformasi pembiayaan politik agar kompetisi tidak terlalu tergantung pada modal besar. Ketiga, menjaga independensi lembaga pengawasan dan kualitas checks and balances.

Keempat, meningkatkan state capacity melalui meritocracy, digital government, interoperable data, dan evaluasi kebijakan. Kelima, meningkatkan productivity reform: pendidikan, skill, kompetisi, logistics, innovation, dan ease of doing business yang berorientasi pada kualitas.

Keenam, membangun pekerjaan kelas menengah. Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi wage growth dan social security. Ketujuh, memperkuat daerah melalui transfer berbasis hasil dan transparansi.

Kedelapan, memperkuat kebebasan informasi dan media sambil mengembangkan strategi melawan disinformasi yang proporsional. Kesembilan, membuka data kontrak publik, beneficial ownership, dan konflik kepentingan.

Kesepuluh, meningkatkan kualitas deliberasi kebijakan. Konsultasi dapat menggunakan teknologi digital, tetapi hasil dan alasan keputusan harus dipublikasikan.

Kesebelas, membangun policy institutions yang dapat berpikir lintas siklus pemilu untuk iklim, pendidikan, industri, dan demografi. Kedua belas, memperkuat pendidikan kewargaan dan literasi ekonomi.

Agenda tersebut menunjukkan bahwa demokrasi dan pembangunan bukan dua proyek terpisah. Kualitas pemerintahan adalah persimpangan keduanya.

26. Implikasi bagi Ilmu dan Pendidikan Manajemen

Topik demokrasi–pembangunan sangat relevan bagi ilmu manajemen karena organisasi tidak hidup dalam ruang hampa. Strategy, investment, governance, ESG, human resources, supply chain, dan innovation semuanya dipengaruhi kualitas institusi.

Bagi mahasiswa manajemen, demokrasi dapat dipahami sebagai governance system pada level nasional. Konsep checks and balances memiliki analogi dengan corporate governance. Transparansi publik mirip disclosure. Rule of law mirip kepastian kontrak. Citizen voice mirip stakeholder voice.

Perusahaan yang beroperasi di lingkungan institusional kuat memiliki biaya tertentu karena compliance, tetapi memperoleh manfaat berupa predictability. Sebaliknya, perusahaan yang bergantung pada political connections mungkin memperoleh keuntungan jangka pendek tetapi menghadapi risk tinggi jika kekuasaan berubah.

Business schools perlu mengajarkan political economy, business ethics, public policy, dan institutional analysis bersama finance dan marketing. Manajer masa depan harus memahami bahwa strategi tidak hanya soal market positioning, tetapi juga legitimacy.

AI juga dapat membantu memantau governance melalui data, tetapi ethical governance diperlukan. Data-driven government tidak boleh berubah menjadi opaque algorithmic government.

Dengan demikian, pendidikan manajemen memiliki tanggung jawab mencetak pemimpin yang mengejar performance sekaligus institutional integrity.

27. Kesimpulan: Masih Seiring, tetapi Tidak Otomatis

Apakah demokrasi dan pembangunan ekonomi masih berjalan seiring di Indonesia? Jawaban yang paling tepat adalah: sebagian masih, tetapi hubungan itu tidak otomatis dan menunjukkan tanda-tanda ketegangan.

Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi relatif stabil dan mencatat kemajuan kemiskinan, ketimpangan, serta pembangunan manusia. Ini menunjukkan bahwa demokrasi pasca-Reformasi tidak menghalangi pembangunan. Bahkan banyak institusi demokrasi telah membantu menciptakan stabilitas politik dan mekanisme koreksi.

Namun kualitas demokrasi menghadapi tantangan menurut berbagai indikator. Jika tekanan terhadap kebebasan, checks and balances, rule of law, dan accountability berlanjut, risiko terhadap pembangunan mungkin tidak muncul segera dalam angka PDB, tetapi dapat terakumulasi melalui rent seeking, uncertainty, menurunnya trust, dan berkurangnya policy learning.

Karena itu, Indonesia tidak perlu memilih antara demokrasi dan pembangunan. Pilihan tersebut adalah false dichotomy. Tantangan sebenarnya adalah menciptakan capable democracy dan inclusive development.

Demokrasi yang efektif harus mampu menghasilkan keputusan, bukan sekadar perdebatan. Pembangunan yang berhasil harus memperluas kebebasan dan kesempatan, bukan hanya output. Keduanya bertemu dalam institusi.

Indonesia memiliki modal besar: populasi muda, pasar besar, sumber daya, posisi geopolitik strategis, dan pengalaman demokratis lebih dari dua dekade. Tantangannya adalah mengubah modal tersebut menjadi produktivitas dan trust.

Jika demokrasi diperkuat bersama state capacity, rule of law, dan kebijakan berbasis bukti, ia dapat menjadi aset pembangunan. Jika pertumbuhan digunakan untuk memperluas kesempatan dan memperkuat kelas menengah, pembangunan dapat menjadi fondasi demokrasi.

Masa depan Indonesia bukan ditentukan oleh pertanyaan apakah demokrasi atau ekonomi lebih penting, melainkan apakah bangsa mampu membangun institusi yang membuat keduanya saling memperkuat.

28. Demokrasi, Pertumbuhan, dan Kausalitas: Menghindari Kesimpulan yang Terlalu Sederhana

Menyatakan bahwa demokrasi menyebabkan pertumbuhan atau pertumbuhan menyebabkan demokrasi merupakan klaim kausal yang jauh lebih sulit daripada sekadar menunjukkan korelasi. Negara-negara berbeda dalam sejarah, geografi, institusi, sumber daya alam, budaya politik, struktur sosial, demografi, dan posisi geopolitik. Faktor-faktor tersebut dapat memengaruhi demokrasi sekaligus pertumbuhan. Karena itu, penelitian empiris menggunakan berbagai strategi untuk memisahkan hubungan kausal dari korelasi.

Barro menemukan hubungan yang tidak sederhana antara demokrasi dan pertumbuhan, sementara studi-studi berikutnya memperlihatkan hasil yang bergantung pada periode, sampel, dan metode. Acemoglu, Naidu, Restrepo, dan Robinson menggunakan pendekatan empiris yang lebih baru dan menyimpulkan bahwa demokratisasi memiliki efek positif terhadap PDB dalam jangka panjang. Mekanismenya antara lain investasi, reformasi ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan berkurangnya konflik sosial. Meta-analisis Doucouliagos dan Ulubaşoğlu menunjukkan bahwa demokrasi memiliki dampak tidak langsung melalui human capital, inflasi, stabilitas politik, dan kebebasan ekonomi.

Pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa kita tidak boleh menarik kesimpulan hanya dari dua grafik: indeks demokrasi dan pertumbuhan PDB. Misalnya, jika skor demokrasi turun pada satu tahun sementara PDB meningkat, hal itu tidak membuktikan demokrasi tidak penting. Efek institusi dapat memiliki lag panjang. Investasi yang menghasilkan output hari ini mungkin merupakan hasil keputusan dan pembangunan kapasitas bertahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, pelemahan institusi dapat meningkatkan risiko yang baru terlihat ketika ekonomi mengalami shock.

Hubungan kausal juga dapat berjalan dua arah. Pertumbuhan meningkatkan penerimaan negara, memperluas pendidikan, dan menciptakan kelompok profesional yang menuntut governance lebih baik. Namun pertumbuhan juga dapat memperbesar sumber daya yang diperebutkan elite. Jika institusi lemah, kenaikan rente dari sumber daya alam atau proyek besar dapat memperkuat political capture. Dengan demikian, growth can democratize or concentrate power, tergantung pada struktur distribusinya.

Dalam analisis manajemen, ini mirip dengan hubungan antara corporate governance dan financial performance. Perusahaan dengan governance baik dapat berkinerja lebih baik, tetapi perusahaan yang berkinerja baik juga memiliki sumber daya lebih besar untuk membangun governance. Selain itu, variabel ketiga seperti kualitas manajemen dapat memengaruhi keduanya. Penelitian yang baik harus menghindari reverse causality.

Untuk Indonesia, cara paling produktif adalah melihat mekanisme. Apakah transparansi anggaran meningkatkan efektivitas belanja? Apakah kebebasan pers mengurangi korupsi lokal? Apakah kompetisi elektoral meningkatkan pelayanan? Apakah rule of law meningkatkan investasi jangka panjang? Pertanyaan mekanistik lebih dapat diuji daripada pertanyaan besar yang terlalu agregat.

Pendekatan ini juga mengurangi politisasi debat. Alih-alih mengatakan demokrasi pasti baik atau pasti buruk bagi ekonomi, kita dapat menilai institusi spesifik dan outcome spesifik. Misalnya, judicial independence dapat diuji terhadap investasi, open data terhadap procurement efficiency, merit system terhadap kualitas layanan, dan media freedom terhadap corruption detection.

Kausalitas dalam ilmu sosial jarang sempurna, tetapi pemikiran kausal membantu kebijakan. Pemerintah tidak cukup mengetahui bahwa dua indikator bergerak bersama; pemerintah perlu memahami saluran yang dapat dipengaruhi. Jika saluran utama adalah rule of law, reformasi harus fokus pada enforcement. Jika saluran utama adalah human capital, pendidikan perlu diprioritaskan. Jika masalahnya political capture, transparansi pembiayaan politik menjadi penting.

Dengan demikian, hubungan demokrasi dan pembangunan harus dipahami sebagai sistem sebab-akibat yang berlapis. Demokrasi memengaruhi institusi, institusi memengaruhi kebijakan, kebijakan memengaruhi investasi dan distribusi, distribusi memengaruhi legitimasi, dan legitimasi kembali memengaruhi demokrasi. Indonesia tidak membutuhkan slogan kausal, tetapi diagnosis sistemik.

29. Oligarki, Konsentrasi Ekonomi, dan Tantangan Kesetaraan Politik

Dalam demokrasi modern, salah satu tantangan utama adalah ketegangan antara kesetaraan politik formal dan ketimpangan sumber daya ekonomi. Setiap warga memiliki satu suara, tetapi kemampuan memengaruhi agenda publik tidak hanya berasal dari suara. Kekayaan dapat digunakan untuk membiayai organisasi, media, kampanye, jaringan kebijakan, penelitian, lobbying, atau komunikasi publik. Jika konsentrasi ekonomi terlalu tinggi dan regulasi politik lemah, democratic equality dapat terkikis.

Indonesia memiliki struktur ekonomi yang mencakup konglomerasi besar, BUMN, perusahaan multinasional, UMKM, dan sektor informal yang sangat luas. Struktur ini tidak dengan sendirinya anti-demokratis. Perusahaan besar dapat mendorong investasi dan inovasi. Masalah muncul ketika economic concentration diterjemahkan menjadi policy privilege yang tidak transparan.

Konsep oligarki dalam studi Indonesia sering digunakan untuk menjelaskan daya tahan elite ekonomi-politik setelah Reformasi. Pendekatan ini menekankan bahwa demokratisasi dapat mengubah arena kompetisi tanpa sepenuhnya menghilangkan konsentrasi kekuasaan material. Elite beradaptasi terhadap pemilu, partai, dan desentralisasi. Namun analisis oligarki juga perlu berhati-hati agar tidak menganggap semua kebijakan sebagai hasil konspirasi elite. Negara memiliki birokrasi, masyarakat sipil, pemilih, pengadilan, media, dan aktor bisnis yang kepentingannya tidak selalu sama.

Dari perspektif pembangunan, konsentrasi kekuasaan ekonomi menjadi masalah jika mengurangi kompetisi. Perusahaan yang memperoleh akses istimewa dapat menghambat entry pemain baru. Innovation decline terjadi ketika incumbent lebih memilih melindungi posisi melalui regulasi

daripada meningkatkan produktivitas. Inilah hubungan langsung antara democratic fairness dan market competition.

Reformasi competition policy karena itu memiliki makna politik. Pasar yang kompetitif mendispersikan peluang ekonomi. UMKM dan startup memiliki kesempatan tumbuh jika aturan tidak bias. Procurement yang terbuka memungkinkan perusahaan baru bersaing. Akses kredit yang lebih luas mengurangi ketergantungan pada jaringan.

Transparansi beneficial ownership juga penting. Negara perlu mengetahui siapa pemilik sebenarnya dari badan usaha yang memperoleh kontrak atau konsesi. Tanpa informasi tersebut, conflict of interest sulit dideteksi. Keterbukaan bukan berarti anti-bisnis; justru menciptakan level playing field.

Pembiayaan politik adalah titik strategis. Jika kampanye sangat mahal, kandidat akan bergantung pada donor besar. Public funding yang disertai audit, batas sumbangan, disclosure real-time, dan enforcement dapat mengurangi ketergantungan tersebut. Reformasi partai perlu dilihat sebagai reformasi ekonomi karena kualitas kebijakan publik dipengaruhi oleh struktur insentif partai.

Bagi kelas bisnis sendiri, governance yang lebih terbuka memiliki manfaat jangka panjang. Sistem berbasis koneksi menciptakan ketidakpastian ketika jaringan politik berubah. Sistem berbasis aturan menciptakan predictable competition. Perusahaan yang kompetitif seharusnya lebih memilih rule-based capitalism daripada crony capitalism.

Dengan demikian, isu oligarki bukan alasan untuk pesimisme fatalistik. Ia merupakan diagnosis terhadap risiko konsentrasi kekuasaan. Jawaban demokratisnya adalah memperluas transparansi, kompetisi, akses, dan rule of law. Pembangunan ekonomi yang menghasilkan lebih banyak pusat kekuatan produktif dapat memperkuat pluralisme politik; pembangunan yang hanya memperbesar rente dapat melakukan sebaliknya.

30. Politik Anggaran: APBN sebagai Arena Demokrasi dan Instrumen Pembangunan

Anggaran negara adalah salah satu titik paling konkret di mana demokrasi bertemu pembangunan. APBN bukan sekadar dokumen teknis akuntansi; ia merupakan pernyataan prioritas politik. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, subsidi, bantuan sosial, atau pembayaran utang mencerminkan pilihan di antara tujuan yang bersaing.

Dalam demokrasi, anggaran seharusnya melalui deliberasi dan oversight. Parlemen memeriksa rancangan pemerintah, publik memperoleh informasi, media membahas prioritas, dan lembaga audit menilai pelaksanaan. Proses ini dapat tampak lambat tetapi memiliki fungsi legitimasi dan kontrol.

Pembangunan membutuhkan fiscal space. Indonesia secara historis menjaga batas defisit dan disiplin fiskal. Disiplin ini penting agar kebijakan tidak membebani generasi mendatang. Namun fiscal discipline bukan berarti belanja harus selalu ditekan. Yang lebih penting adalah kualitas dan productivity of expenditure.

Belanja pendidikan, misalnya, harus dinilai dari learning outcome, bukan hanya persentase anggaran. Belanja infrastruktur dinilai dari connectivity dan economic return, bukan hanya kilometer jalan. Bantuan sosial dinilai dari ketepatan sasaran dan graduation pathway, bukan hanya jumlah penerima. Demokrasi yang matang membutuhkan outcome-based accountability.

Open budget data dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Publik tidak mungkin membaca jutaan baris anggaran tanpa alat digital. Data visualization, procurement dashboards, dan machine-readable budgets memungkinkan akademisi, jurnalis, dan masyarakat melakukan analisis independen.

Namun keterbukaan data harus diikuti kemampuan interpretasi. Angka anggaran dapat disalahgunakan untuk narasi politik jika konteks tidak dijelaskan. Pemerintah perlu menyediakan metadata, baseline, dan outcome indicators.

Politik anggaran juga terkait dengan intergovernmental transfers. Transfer ke daerah dapat mengurangi kesenjangan, tetapi desainnya harus memberi insentif kinerja. Daerah yang meningkatkan pelayanan dan pendapatan lokal seharusnya memperoleh reward tanpa menciptakan ketergantungan.

Dalam kondisi demokrasi elektoral, program yang visible lebih mudah dijual daripada reformasi yang intangible. Karena itu, penguatan lembaga perencanaan dan evaluasi sangat penting. Cost-benefit analysis tidak boleh menggantikan keputusan politik, tetapi harus menjadi input wajib.

Fiscal transparency juga mengurangi risiko hidden liabilities. Proyek melalui BUMN atau skema khusus dapat memiliki kewajiban kontinjensi. Publik memerlukan gambaran utuh terhadap risiko fiskal.

Dalam perspektif jangka panjang, APBN adalah kontrak antargenerasi. Utang, iklim, pendidikan, dan infrastruktur memengaruhi warga yang belum memilih hari ini. Demokrasi perlu membangun mekanisme yang mewakili future interests.

Karena itu, kualitas politik anggaran dapat digunakan sebagai indikator apakah demokrasi dan pembangunan berjalan seiring. Bila proses terbuka, berbasis bukti, dan outcome-oriented, keduanya saling memperkuat. Bila anggaran menjadi arena patronase tanpa evaluasi, keduanya menjauh.

31. BUMN, Danantara, dan Tata Kelola Aset Negara: Perspektif Demokrasi Ekonomi

Indonesia memiliki peran negara yang besar melalui badan usaha milik negara dan pengelolaan aset publik. BUMN dapat menjadi alat pembangunan, terutama di sektor yang membutuhkan investasi jangka panjang, memiliki natural monopoly, atau penting bagi ketahanan nasional. Namun kekuatan ekonomi negara juga menimbulkan kebutuhan governance yang tinggi.

Dalam perspektif demokrasi ekonomi, aset negara pada akhirnya adalah aset publik. Pengelolaannya harus memenuhi prinsip profesionalisme, transparency, accountability, dan

commercial discipline. Tujuan kebijakan perlu jelas: kapan BUMN mengejar laba, kapan menjalankan public service obligation, dan bagaimana kompensasi diberikan.

Pembentukan struktur pengelolaan investasi negara yang lebih terkoordinasi dapat meningkatkan efisiensi apabila mampu mengurangi fragmentasi, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong portfolio discipline. Namun semakin besar konsentrasi aset dalam suatu lembaga, semakin penting mekanisme oversight. Governance architecture harus mampu memisahkan keputusan komersial dari intervensi politik jangka pendek.

Prinsip demokrasi di sini bukan berarti setiap investasi diputuskan melalui voting publik. Itu tidak efisien. Demokrasi bekerja melalui mandate, disclosure, audit, parliamentary oversight, professional board, conflict-of-interest rules, dan reporting. Ini mirip corporate governance: pemegang saham tidak mengelola operasi harian, tetapi menetapkan tata kelola yang memastikan manajemen bertanggung jawab.

Risiko lain adalah soft budget constraint. BUMN yang menganggap negara akan selalu menyelamatkan dapat mengambil risiko berlebihan. Disiplin pasar perlu dipadukan dengan fungsi pembangunan. Kinerja harus dibandingkan dengan benchmark yang jelas.

State-owned enterprises juga dapat memengaruhi kompetisi. Jika memperoleh keistimewaan regulasi yang tidak relevan dengan public mandate, private investment dapat terdesak. Sebaliknya, BUMN yang efisien dapat menyediakan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas seluruh sektor swasta.

Dalam konteks demokrasi dan pembangunan, pertanyaan utamanya adalah apakah aset publik menghasilkan public value secara transparan. Public value mencakup laba, layanan, strategic capability, dan spillover, tetapi semuanya harus diukur.

Indonesia dapat menggunakan teknologi untuk memperkuat oversight: consolidated reporting, dashboards, audit analytics, dan disclosure kontrak material. Namun data harus tersedia bagi lembaga pengawasan dan publik dalam bentuk yang cukup bermakna.

Kepercayaan terhadap pengelolaan aset negara merupakan komponen social capital. Bila masyarakat percaya keputusan didasarkan pada merit dan kepentingan jangka panjang, pemerintah memiliki ruang lebih besar melakukan kebijakan industri. Bila kepercayaan rendah, setiap proyek besar mudah dicurigai.

Dengan demikian, tata kelola BUMN dan sovereign investment merupakan ujian praktis hubungan demokrasi dengan pembangunan. Negara kuat tidak berarti negara tanpa kontrol; justru semakin besar kapasitas ekonomi negara, semakin besar kebutuhan institutional accountability.

32. Infrastruktur Besar, IKN, dan Pertanyaan tentang Legitimasi Pembangunan

Mega-project merupakan simbol pembangunan karena terlihat jelas, memobilisasi investasi besar, dan dapat mengubah geografi ekonomi. Infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, kawasan industri, transportasi massal, bendungan, dan pembangunan ibu kota memiliki potential multiplier effects. Tetapi mega-project juga memiliki risiko biaya, displacement, ecological impact, dan lock-in.

Dalam demokrasi, proyek besar membutuhkan legitimacy. Legitimacy terdiri dari input legitimacy—apakah proses melibatkan pihak terkait; throughput legitimacy—apakah proses transparan dan fair; serta output legitimacy—apakah hasil memberi manfaat.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara, misalnya, dapat dianalisis sebagai kebijakan spatial rebalancing, administrative modernization, dan urban development. Pertanyaan akademik bukan sekadar pro atau kontra, tetapi apakah asumsi ekonomi, pembiayaan, environmental design, population movement, dan governance diuji secara transparan.

Mega-project sering menghadapi optimism bias. Estimasi biaya cenderung terlalu rendah dan manfaat terlalu tinggi. Karena itu, independent review penting. Demokrasi menyediakan ruang untuk challenge assumptions sebelum sunk cost terlalu besar.

Namun kritik juga harus fair. Tidak semua perubahan estimasi berarti kegagalan; proyek jangka panjang memang menghadapi uncertainty. Kuncinya adalah adaptive governance: kemampuan memperbarui rencana berdasarkan data.

Pembangunan infrastruktur dapat memperkuat demokrasi jika membuka akses daerah, mengurangi inequality, dan meningkatkan mobility. Jalan dan internet memungkinkan warga lebih terhubung dengan pasar dan informasi. Sebaliknya, proyek yang mengabaikan hak masyarakat dapat menimbulkan grievance.

Prinsip free, prior, and informed consultation menjadi relevan terutama bagi komunitas lokal dan adat. Hak tidak harus berarti veto absolut, tetapi proses harus memastikan suara terdampak masuk dalam keputusan.

Financing transparency juga penting. Public-private partnership dapat efisien, tetapi pembagian risiko harus jelas. Pemerintah tidak boleh menyembunyikan kewajiban masa depan di luar neraca publik.

Dalam manajemen proyek, governance menentukan success. Scope, budget, schedule, risk, stakeholder, dan benefit realization harus dikelola. Pada mega-project publik, stakeholder adalah seluruh warga dan generasi mendatang.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak bertentangan dengan demokrasi. Demokrasi yang baik justru meningkatkan kualitas project selection melalui scrutiny. Tantangannya adalah membuat scrutiny tidak berubah menjadi paralysis dan speed tidak berubah menjadi bypass.

33. Politik Pangan, Energi, dan Subsidi: Antara Keadilan dan Efisiensi

Pangan dan energi sangat sensitif secara politik karena memengaruhi biaya hidup. Pemerintah demokratis menghadapi tekanan besar untuk menjaga harga. Subsidi dapat melindungi rumah tangga dan menstabilkan ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan distorsi dan beban fiskal jika tidak terarah.

Politik pangan menunjukkan pentingnya data. Kebijakan impor, cadangan, harga pembelian, dan distribusi harus berdasarkan supply-demand yang akurat. Jika keputusan terlalu dipengaruhi kepentingan kelompok, konsumen dan petani dapat sama-sama dirugikan.

Demokrasi menyediakan representasi bagi petani, konsumen, dan pelaku usaha, tetapi representation tidak otomatis menghasilkan policy coherence. Kelompok yang terorganisasi lebih kuat dapat memiliki suara lebih besar.

Energi menghadapi masalah serupa. Subsidi bahan bakar dapat membantu rumah tangga, tetapi jika dinikmati lebih banyak oleh kelompok berpendapatan tinggi, efektivitas redistribusi rendah. Reformasi subsidi sering politically difficult.

Solusi membutuhkan compensatory politics. Pengurangan subsidi yang tidak tepat sasaran perlu disertai transfer langsung, transportasi publik, dan komunikasi transparan. Demokrasi menjadi mekanisme negosiasi social contract.

Ketahanan pangan juga tidak sama dengan swasembada semua komoditas. Ketahanan berarti akses yang stabil dan terjangkau. Diversifikasi sumber, produktivitas petani, logistik, dan cadangan strategis semua penting.

Transisi energi memerlukan kebijakan harga karbon atau instrumen lain yang dapat meningkatkan biaya jangka pendek. Tanpa legitimasi, reformasi akan ditolak. Karena itu, transparansi penggunaan pendapatan dan perlindungan kelompok rentan sangat penting.

Kebijakan pangan dan energi memperlihatkan bahwa demokrasi sering menghadapi trade-off nyata, bukan sekadar masalah teknis. Efisiensi ekonomi harus dinegosiasikan dengan keadilan sosial.

Manajemen yang baik memerlukan scenario planning dan stakeholder mapping. Pemerintah harus mengantisipasi siapa yang menang dan kalah dari perubahan kebijakan.

Jika proses terbuka dan kompensasi fair, demokrasi dapat memfasilitasi reformasi sulit. Jika proses dianggap tidak adil, reformasi ekonomi dapat menurunkan trust.

34. Pajak, Representasi, dan Social Contract

Hubungan antara pajak dan demokrasi memiliki sejarah panjang. Slogan “no taxation without representation” menggambarkan gagasan bahwa warga yang membayar pajak menuntut suara atas penggunaan dana publik. Sebaliknya, negara yang memberikan layanan berkualitas memperoleh legitimasi untuk memungut pajak.

Indonesia membutuhkan tax ratio yang memadai untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertahanan, dan perlindungan sosial. Namun peningkatan penerimaan tidak hanya soal tarif. Compliance bergantung pada trust, simplicity, enforcement, dan perceived fairness.

Warga lebih bersedia membayar pajak jika percaya orang lain juga membayar dan dana digunakan dengan baik. Jika mereka melihat privilege atau korupsi, voluntary compliance menurun. Karena itu, anti-corruption dan tax reform saling terkait.

Digitalisasi administrasi pajak dapat meningkatkan compliance dan mengurangi interaction cost. Tetapi data pribadi harus dilindungi. State capacity yang lebih kuat harus diimbangi data governance.

Progressivity juga penting. Sistem pajak harus mempertimbangkan ability to pay tanpa menghambat investasi produktif. Debate mengenai tarif perlu berbasis evidence.

Tax expenditure—insentif dan pengecualian—harus transparan karena secara ekonomi setara dengan belanja. Publik perlu mengetahui siapa menerima manfaat dan apa outcome.

Di tingkat daerah, peningkatan pendapatan lokal dapat memperkuat accountability karena warga lebih sadar hubungan antara pajak dan layanan. Namun pajak daerah tidak boleh menciptakan fragmentation yang menghambat perdagangan domestik.

Social contract fiskal yang sehat memiliki lingkaran: pelayanan baik meningkatkan trust, trust meningkatkan compliance, compliance meningkatkan kapasitas negara, kapasitas meningkatkan pelayanan.

Jika hubungan ini terputus, negara masuk low-trust equilibrium. Warga menghindari pajak karena layanan buruk, dan layanan tetap buruk karena penerimaan rendah.

Demokrasi dapat memperkuat social contract melalui transparansi dan representasi. Pembangunan memberi substansi melalui layanan nyata.

35. Ketahanan Demokrasi dalam Krisis Ekonomi dan Geopolitik

Krisis adalah ujian hubungan demokrasi dan pembangunan. Pada masa normal, institusi dapat terlihat stabil. Ketika terjadi resesi, pandemi, konflik geopolitik, atau shock pangan, tekanan meningkat.

Krisis 1997-1998 menunjukkan bagaimana keruntuhan ekonomi dapat memicu transformasi politik. Pandemi COVID-19 menunjukkan kebutuhan extraordinary measures tetapi juga pentingnya oversight. Masa depan dapat membawa shock dari climate events, financial volatility, cyberattack, atau konflik perdagangan.

Demokrasi memiliki kelebihan dalam crisis adaptation jika informasi terbuka dan trust tinggi. Pemerintah dapat memperoleh feedback cepat. Namun demokrasi juga dapat mengalami polarization yang menghambat response.

State capacity dan social trust menjadi kunci. Negara harus mampu bertindak cepat tetapi menjelaskan alasan, data, dan batas kewenangan. Emergency powers harus temporary.

Geopolitik juga memengaruhi pembangunan Indonesia. Persaingan AS-China, fragmentasi perdagangan, dan security of supply chains menciptakan peluang sekaligus risiko. Indonesia perlu menjaga strategic autonomy.

Demokrasi dapat membantu foreign policy legitimacy, tetapi keputusan geopolitik sering membutuhkan confidentiality. Oversight tetap diperlukan untuk mencegah personalistic policy.

Economic resilience berarti diversifikasi pasar, cadangan devisa, ketahanan pangan-energi, sistem keuangan kuat, dan social safety net. Political resilience berarti institutions that can absorb conflict.

Keduanya saling bergantung. Krisis ekonomi dapat memperlemah demokrasi jika masyarakat kehilangan kepercayaan; demokrasi yang lemah dapat memperburuk krisis jika informasi disembunyikan.

Indonesia perlu membangun crisis governance framework yang menggabungkan command capability dengan transparency.

36. Perbandingan Internasional: Pelajaran tanpa Meniru Secara Mekanis

Perdebatan Indonesia sering membandingkan dengan negara lain. Singapura, Korea Selatan, China, India, Brasil, atau negara Nordik digunakan sebagai contoh. Perbandingan berguna, tetapi harus hati-hati.

Singapura menunjukkan state capacity tinggi, rule of law komersial kuat, dan kebijakan jangka panjang. Korea Selatan dan Taiwan mengalami industrialisasi di bawah rezim tidak demokratis lalu demokratisasi pada tingkat pendapatan lebih tinggi. China menunjukkan pertumbuhan sangat tinggi di bawah sistem politik berbeda. India menunjukkan demokrasi besar dengan pertumbuhan dan tantangan implementasi.

Tidak ada model yang dapat di-copy. Setiap negara memiliki sejarah dan institusi. Yang dapat dipelajari adalah mekanisme: meritocratic bureaucracy, export discipline, education, competition, infrastructure, fiscal credibility, atau innovation systems.

Indonesia memiliki kondisi pluralisme, kepulauan, desentralisasi, dan sejarah sendiri. Sistem yang terlalu tersentralisasi mungkin tidak sesuai dengan kompleksitasnya.

Pelajaran penting dari negara maju adalah bahwa high-income status hampir selalu disertai institusi yang dapat mendukung kompleksitas ekonomi: property rights, courts, skilled bureaucracy, research universities, dan trust.

Beberapa negara non-demokratis berhasil tumbuh, tetapi survivorship bias harus dihindari. Kita sering melihat yang berhasil dan melupakan banyak rezim serupa yang gagal.

Demokrasi juga memiliki variasi kualitas. Negara dengan institusi demokrasi kuat biasanya menggabungkan competition dengan professional administration.

Bagi Indonesia, benchmarking sebaiknya dilakukan per fungsi, bukan per regime. Pelajari tax administration dari negara terbaik, vocational system dari yang efektif, digital government dari pemimpin global, dan competition policy dari yurisdiksi yang matang.

Tujuannya bukan menjadi negara lain, tetapi memperkuat Indonesian institutional capability.

37. Pengukuran Keberhasilan: Dashboard Demokrasi-Pembangunan yang Terintegrasi

Jika demokrasi dan pembangunan ingin dikelola sebagai agenda saling terkait, pemerintah dan akademisi membutuhkan measurement framework yang terintegrasi. PDB saja terlalu sempit; indeks demokrasi saja juga tidak menangkap outcome ekonomi.

Dashboard dapat memiliki lima kelompok indikator. Pertama, economic performance: growth, productivity, investment, inflation, employment, wage growth. Kedua, inclusion: poverty, inequality, mobility, access to education-health, regional disparities. Ketiga, institutional quality: rule of law,

regulatory quality, corruption control, government effectiveness. Keempat, democratic quality: competition, participation, civil liberties, media freedom, checks and balances. Kelima, trust and resilience: public trust, fiscal sustainability, climate resilience, digital security.

Analisis harus melihat trade-off dan lag. Reformasi pendidikan mungkin membutuhkan satu dekade untuk memengaruhi produktivitas. Reformasi hukum mungkin meningkatkan confidence secara bertahap.

Data subnasional sangat penting. Rata-rata nasional dapat menyembunyikan daerah yang tertinggal. Kabupaten/kota dapat dibandingkan untuk menemukan best practices.

Causal evaluation harus dibangun dalam kebijakan. Pilot programs, randomized evaluation bila etis, difference-in-differences, dan natural experiments dapat meningkatkan pembelajaran.

Indikator demokrasi juga perlu mixed methods. Angka perlu dilengkapi qualitative assessment. Misalnya, jumlah konsultasi publik tidak menjamin kualitas partisipasi.

Dashboard publik dapat memperkuat accountability. Namun harus dijaga dari gaming. Jika satu indikator menjadi target, organisasi dapat mengoptimalkan angka tanpa memperbaiki realitas.

Balanced scorecard untuk negara dapat mengambil inspirasi manajemen: financial/economic, citizen, internal process, learning and growth. Tetapi nilai demokrasi seperti rights tidak boleh direduksi menjadi KPI semata.

Tujuan pengukuran adalah learning, bukan propaganda. Data buruk harus dilihat sebagai sinyal perbaikan.

Indonesia memiliki kapasitas statistik kuat melalui BPS. Integrasi data administrasi dan survei dapat menghasilkan governance intelligence yang lebih baik.

38. Kerangka Analitis untuk Penelitian Lanjutan

Topik demokrasi dan pembangunan di Indonesia membuka banyak agenda penelitian. Pertama, studi subnasional dapat menguji apakah daerah dengan kualitas demokrasi lokal lebih tinggi memiliki pertumbuhan, investasi, atau pelayanan lebih baik.

Kedua, penelitian dapat menguji mediating role of corruption control atau government effectiveness antara democracy dan development. Ini membantu menjawab mekanisme.

Ketiga, kualitas pemilu dapat dikaitkan dengan budget composition. Apakah kompetisi politik meningkatkan belanja pendidikan atau justru belanja visible?

Keempat, media freedom dapat dianalisis terhadap procurement irregularities. Data digital memungkinkan matching antara berita investigatif dan outcome audit.

Kelima, penelitian tentang political connections pada perusahaan dapat menilai apakah koneksi meningkatkan akses pembiayaan tetapi menurunkan productivity incentives.

Keenam, reformasi pelayanan digital dapat digunakan sebagai natural experiment untuk melihat apakah berkurangnya discretion menurunkan korupsi.

Ketujuh, generational analysis dapat menguji hubungan job insecurity dengan democratic attitudes. Survei panel ideal.

Kedelapan, hilirisasi dapat dianalisis menggunakan distributional incidence: siapa memperoleh wages, rents, tax, environmental costs.

Kesembilan, institutional trust dapat diuji sebagai mediator antara service quality dan support for democracy.

Kesepuluh, AI governance menjadi area baru: apakah penggunaan AI dalam pemerintahan meningkatkan efficiency tanpa mengurangi due process?

Metodologi dapat menggunakan PLS-SEM untuk model prediktif tertentu, CB-SEM untuk confirmatory theory testing, multilevel modeling untuk data individu-daerah, panel regression untuk data longitudinal, QCA untuk konfigurasi institusional, dan qualitative process tracing untuk mekanisme politik.

Penting membedakan research gap dengan theory gap. “Belum diteliti di Indonesia” adalah contextual gap. Theory gap muncul jika teori tidak menjelaskan kondisi spesifik, misalnya mengapa electoral competition meningkatkan public goods di sebagian daerah tetapi patronage di daerah lain.

Model teoritis dapat mengintegrasikan institutional theory, public choice, social capital, state capacity, dan development economics. Namun integrasi harus parsimonious.

Penelitian juga perlu memperhatikan endogeneity. Demokrasi dan pembangunan saling memengaruhi. Instrumental variables, lagged models, atau natural experiments dapat membantu, tetapi asumsi harus transparan.

Data demokrasi memiliki measurement error. Triangulasi antara IDI, V-Dem, Freedom House, survei nasional, dan indikator administratif dapat meningkatkan robustness.

Agenda ini menunjukkan bahwa debat demokrasi-pembangunan bukan hanya normatif; ia dapat diuji secara empiris dengan metode manajemen dan ekonomi modern.

39. Refleksi Normatif: Pembangunan untuk Siapa dan Demokrasi untuk Apa?

Pada akhirnya, perdebatan demokrasi dan pembangunan tidak dapat sepenuhnya dipisahkan dari pertanyaan nilai. Ekonomi dapat memberi tahu bagaimana meningkatkan output, tetapi masyarakat harus menentukan untuk apa output digunakan. Demokrasi adalah mekanisme untuk membahas tujuan kolektif tersebut.

Jika pembangunan hanya diukur dari PDB, keberhasilan dapat berdampingan dengan kerusakan lingkungan, ketimpangan kesempatan, atau rasa tidak aman. Jika demokrasi hanya diukur dari pemilu, ia dapat berdampingan dengan rendahnya kualitas layanan dan ketidakberdayaan ekonomi.

Pertanyaan “pembangunan untuk siapa?” menuntut analisis distribusi. Siapa menerima manfaat, siapa menanggung biaya, dan siapa memiliki suara. Pertanyaan “demokrasi untuk apa?” menuntut analisis kapasitas: apakah demokrasi menghasilkan kebijakan yang meningkatkan kehidupan.

Keduanya bertemu pada konsep human dignity. Warga bukan hanya konsumen atau voters, tetapi manusia yang membutuhkan kebebasan dan kemampuan.

Demokrasi yang tidak menghasilkan pembangunan dapat kehilangan legitimasi. Pembangunan tanpa demokrasi dapat kehilangan koreksi dan keadilan prosedural.

Indonesia memiliki filosofi Pancasila yang menempatkan demokrasi, keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan dalam satu kerangka. Dalam interpretasi pembangunan, ini berarti efisiensi ekonomi harus ditempatkan bersama fairness dan participation.

Musyawarah dapat dibaca bukan sebagai alasan memperlambat keputusan, tetapi sebagai metode membangun legitimacy. Namun musyawarah harus inklusif dan berbasis data.

Keadilan sosial bukan berarti menolak pasar, tetapi memastikan pasar beroperasi dalam rule of law dan kesempatan lebih luas.

Persatuan bukan berarti menghapus kritik, tetapi menjaga konflik tetap dalam institusi yang damai.

Dalam konteks Indonesia Emas 2045, keberhasilan seharusnya diukur dari apakah warga lebih makmur, lebih mampu, lebih aman, dan lebih bebas mengambil keputusan hidup.

Dengan perspektif ini, pertanyaan apakah demokrasi dan pembangunan berjalan seiring menjadi pertanyaan tentang kualitas peradaban politik-ekonomi. Pertumbuhan memberi kemampuan material; demokrasi memberi mekanisme menentukan arah; institusi menghubungkan keduanya.

Indonesia masih memiliki kesempatan besar untuk memperkuat hubungan tersebut. Tidak ada jaminan otomatis, tetapi juga tidak ada alasan untuk menerima trade-off sebagai takdir.

40. Epilog: Dari Growth versus Democracy menuju Institutional Synergy

Debat publik sering menyukai pilihan sederhana. Pertumbuhan atau demokrasi. Stabilitas atau kebebasan. Investasi atau lingkungan. Kecepatan atau partisipasi. Namun manajemen strategis mengajarkan bahwa banyak masalah besar bukan memilih salah satu kutub, melainkan merancang sistem yang menghasilkan integrasi.

Perusahaan unggul tidak memilih antara innovation dan efficiency; mereka membangun ambidexterity. Negara modern juga membutuhkan institutional ambidexterity: mampu bertindak cepat dan tetap accountable, mampu menarik investasi dan menjaga fairness, mampu menggunakan teknologi dan melindungi rights.

Demokrasi berkualitas merupakan governance architecture. Ia menyediakan feedback loops. Pemilu adalah feedback periodik, media adalah feedback harian, pengadilan adalah correction mechanism, audit adalah control system, masyarakat sipil adalah stakeholder voice, dan birokrasi profesional adalah execution engine.

Pembangunan ekonomi adalah value creation system. Ia mengubah sumber daya menjadi kesejahteraan. Jika governance architecture lemah, value creation dapat bocor menjadi rents. Jika execution engine lemah, deliberasi tidak menghasilkan outcome.

Dalam bahasa systems thinking, demokrasi dan ekonomi merupakan subsistem yang saling bergantung. Mengoptimalkan satu sambil merusak yang lain dapat menurunkan performance sistem keseluruhan.

Indonesia telah membuktikan bahwa demokratisasi tidak identik dengan kekacauan ekonomi. Tantangan berikutnya lebih sulit: membuktikan bahwa demokrasi dapat mendukung lompatan produktivitas menuju negara berpendapatan tinggi.

Lompatan itu membutuhkan reformasi yang sering tidak populer: peningkatan kualitas pendidikan, disiplin kompetisi, reformasi subsidi, tax compliance, penataan BUMN, environmental pricing, dan penguatan hukum. Demokrasi harus mampu menghasilkan consensus yang cukup untuk menjalankannya.

Sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan bahwa reformasi menghasilkan manfaat yang fair. Tanpa fairness, consensus tidak bertahan.

Institutional synergy berarti setiap reformasi ekonomi juga dinilai dampaknya pada accountability, dan setiap reformasi politik dinilai kontribusinya pada capability.

Pertumbuhan ekonomi 5,11 persen pada 2025 adalah modal, bukan garis akhir. Kemiskinan 8,47 persen menunjukkan kemajuan, tetapi 23,85 juta warga masih berada di bawah garis kemiskinan. IPM 75,90 menunjukkan peningkatan, tetapi kualitas pendidikan dan produktivitas tetap agenda. Indeks demokrasi kategori sedang menunjukkan institusi masih berfungsi tetapi memerlukan penguatan.

Data tersebut tidak mendukung narasi kemenangan penuh maupun kegagalan total. Ia mendukung agenda perbaikan berkelanjutan.

Bagi Indonesia, jalan terbaik bukan kembali ke masa lalu atau mengidealkan model asing. Jalan terbaik adalah membangun versi Indonesia dari capable, inclusive, and accountable state.

Jika berhasil, demokrasi tidak akan menjadi biaya pembangunan. Ia menjadi sistem quality assurance bagi pembangunan. Dan pembangunan tidak akan menjadi alasan mengurangi demokrasi. Ia menjadi sumber capability yang membuat warga mampu menggunakan kebebasannya secara lebih bermakna.

Itulah arti paling substantif dari demokrasi dan pembangunan yang berjalan seiring.

41. Periodisasi Hubungan Demokrasi dan Ekonomi Indonesia: 1998-2026

Hubungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia lebih mudah dipahami jika dibagi ke dalam beberapa fase. Periodisasi tidak dimaksudkan untuk memberi label mutlak pada pemerintahan tertentu, melainkan membantu melihat perubahan institusi, prioritas ekonomi, dan tekanan politik.

Fase pertama, 1998-2004, adalah fase transisi dan rekonstruksi. Krisis moneter telah merusak perbankan, meningkatkan utang publik, dan mendorong kemiskinan. Pada saat yang sama, struktur politik berubah sangat cepat. Prioritas utama adalah mengembalikan stabilitas sekaligus membangun institusi demokrasi. Dalam fase ini, ketidakpastian tinggi tetapi ruang politik berkembang. Reformasi perbankan, restrukturisasi utang, desentralisasi, dan perubahan konstitusi

berjalan bersamaan. Keberhasilan utama fase ini adalah mencegah krisis ekonomi berubah menjadi kegagalan negara.

Fase kedua, sekitar 2004-2014, dapat dilihat sebagai fase konsolidasi. Pemilihan presiden langsung menjadi rutin, pertumbuhan ekonomi membaik, harga komoditas mendukung penerimaan, dan Indonesia memperoleh reputasi sebagai demokrasi besar yang stabil. Program perlindungan sosial berkembang, desentralisasi semakin mapan, dan kebijakan makro memperoleh kredibilitas. Namun fase ini juga memperlihatkan semakin jelasnya biaya politik tinggi, patronase, dan ketergantungan partai terhadap pembiayaan nonpublik.

Fase ketiga, sekitar 2014-2019, menekankan percepatan infrastruktur, reformasi perizinan, dan peningkatan kapasitas pelaksanaan. Negara berusaha mengatasi infrastructure gap yang telah lama menjadi kendala. Dalam perspektif pembangunan, investasi fisik dapat meningkatkan konektivitas dan menurunkan biaya logistik. Dalam perspektif demokrasi, pertanyaan bergeser dari “apakah pemilu berlangsung?” menuju “bagaimana kualitas checks and balances dan ruang kritik ketika negara mengejar eksekusi cepat?”

Fase keempat, 2020-2022, ditandai pandemi COVID-19. Krisis kesehatan memaksa pemerintah menggabungkan kebijakan darurat, stimulus fiskal, pembatasan aktivitas, dan perlindungan sosial. Demokrasi diuji karena keputusan harus cepat dan evidence berubah. Pandemi memperlihatkan pentingnya kapasitas negara, data, koordinasi pusat-daerah, serta komunikasi publik. Ia juga menunjukkan bahwa public trust merupakan aset ekonomi: kebijakan kesehatan lebih efektif ketika warga percaya informasi pemerintah.

Fase kelima, 2023-2026, ditandai normalisasi pascapandemi, kesinambungan kebijakan hilirisasi dan infrastruktur, perkembangan AI serta ekonomi digital, dan dinamika politik setelah Pemilu 2024. Ekonomi tetap tumbuh sekitar lima persen dan indikator sosial membaik, tetapi sejumlah lembaga penilai demokrasi menyoroti kualitas kebebasan sipil, kompetisi, dan constraints on power. Periode ini memunculkan kembali pertanyaan apakah economic continuity dapat berdampingan dengan tekanan institusional.

Periodisasi tersebut menunjukkan bahwa hubungan demokrasi dan ekonomi berubah sesuai tantangan. Pada fase transisi, demokrasi memberi legitimasi rekonstruksi. Pada fase konsolidasi, pertumbuhan membantu stabilitas. Pada fase percepatan, kebutuhan eksekusi meningkatkan tension dengan oversight. Pada masa pandemi, capacity menjadi pusat. Pada fase sekarang, tantangan utamanya adalah menggabungkan continuity dengan accountability.

Ada satu pola penting: Indonesia relatif berhasil menghindari dua ekstrem. Negara tidak mengalami collapse setelah demokratisasi, tetapi juga tidak sepenuhnya menyelesaikan masalah governance. Karena itu, istilah yang tepat mungkin “incomplete institutional transformation”. Banyak institusi formal berubah, tetapi struktur insentif informal beradaptasi.

Bagi studi pembangunan, pengalaman ini menunjukkan path dependence. Institusi baru dibangun di atas struktur lama. Reformasi tidak terjadi di ruang kosong. Desentralisasi, misalnya, tidak hanya memindahkan kewenangan tetapi juga memindahkan arena kompetisi elite. Pemilu langsung meningkatkan accountability tetapi juga biaya kampanye. Kebebasan media meningkatkan informasi tetapi ownership concentration dapat mengubah karakter pluralism.

Periodisasi juga membantu menghindari nostalgia. Setiap fase memiliki trade-off dan konteks berbeda. Membandingkan angka pertumbuhan antarperiode tanpa memperhitungkan commodity cycle, demographic structure, global interest rates, dan base effect dapat menyesatkan. Begitu juga membandingkan kualitas demokrasi hanya dari jumlah partai tanpa melihat kebebasan dan accountability.

Kesimpulan periodisasi ini adalah bahwa demokrasi dan ekonomi di Indonesia memiliki co-evolution. Perubahan pada satu bidang mengubah insentif bidang lain. Reformasi berikutnya perlu dirancang dengan pemahaman terhadap interaksi tersebut. Reformasi ekonomi yang mengabaikan political incentives sering gagal; reformasi politik yang mengabaikan state capacity juga sering mengecewakan.

42. Studi Kasus Konseptual I: Reformasi Birokrasi dan Digital Government

Digital government merupakan contoh konkret bagaimana demokrasi dan pembangunan dapat saling memperkuat. Digitalisasi layanan publik biasanya dibahas sebagai isu efisiensi: proses lebih cepat, biaya transaksi lebih rendah, dan data lebih terintegrasi. Namun dari perspektif demokrasi, digitalisasi juga dapat mengurangi discretion, meningkatkan traceability, dan memperluas akses warga terhadap layanan.

Perizinan usaha yang sebelumnya membutuhkan banyak interaksi tatap muka menciptakan peluang informal payment. Ketika proses menjadi digital dan standar pelayanan dipublikasikan, ruang negosiasi nonformal dapat berkurang. Ini meningkatkan ease of doing business sekaligus integritas. Mekanisme ini menunjukkan bahwa antikorupsi dan produktivitas tidak perlu menjadi agenda terpisah.

Namun digitalisasi bukan obat otomatis. Sistem digital dapat mereplikasi proses buruk. Jika prosedur dasar terlalu kompleks, memindahkannya ke aplikasi hanya menciptakan digital bureaucracy. Bahkan dapat menambah exclusion bagi warga yang tidak memiliki akses atau literasi.

Karena itu, transformasi digital harus dimulai dari process redesign. Prinsip manajemen seperti lean process, customer journey, dan service blueprint dapat diterapkan pada layanan publik. Warga diperlakukan bukan sekadar customer karena mereka memiliki rights, tetapi user-centered design tetap relevan.

Democratic accountability membutuhkan audit trail. Sistem harus mencatat siapa membuat keputusan, kapan, berdasarkan data apa. Algoritma yang menentukan eligibility bantuan atau risk scoring harus dapat diaudit.

Data interoperability meningkatkan efektivitas tetapi meningkatkan privacy risk. Negara yang memiliki data besar tentang warganya memperoleh power besar. Demokrasi menuntut purpose limitation, access control, independent oversight, dan redress mechanism.

Digital government juga dapat meningkatkan participation melalui e-consultation, complaint systems, dan open data. Namun partisipasi digital dapat bias pada kelompok yang lebih terhubung. Offline channels tetap diperlukan.

Indonesia memiliki skala yang membuat digital transformation sangat strategis. Ribuan unit pemerintah dan ratusan pemerintah daerah sering memiliki sistem terpisah. Interoperability dapat menghasilkan efisiensi besar.

Dari sisi ekonomi, layanan cepat mengurangi compliance cost. UMKM paling diuntungkan karena mereka tidak memiliki staf khusus untuk mengurus birokrasi.

Dari sisi demokrasi, transparansi proses mengurangi ketergantungan pada koneksi. Ini memperluas equality before administration.

Namun procurement teknologi harus hati-hati. Vendor lock-in dapat menciptakan rente baru. Open standards dan competitive procurement penting.

AI akan menambah lapisan baru. Chatbot pemerintah dapat meningkatkan pelayanan, tetapi keputusan hukum tidak boleh sepenuhnya diserahkan pada black-box model tanpa human review.

Studi kasus digital government memperlihatkan institutional synergy: teknologi meningkatkan capacity, sementara demokrasi memastikan teknologi digunakan secara accountable.

Jika Indonesia berhasil, digital state dapat menjadi fondasi pembangunan berproduktivitas tinggi. Jika gagal, digitalisasi dapat hanya memperkuat kekuasaan administratif tanpa meningkatkan rights.

Karena itu, ukuran sukses bukan jumlah aplikasi, tetapi waktu layanan, biaya warga, error rate, corruption opportunity, inclusion, privacy, dan trust.

43. Studi Kasus Konseptual II: Kebijakan Industri Nikel dan Ekosistem Kendaraan Listrik

Industri nikel dan kendaraan listrik memberikan contoh penting bagaimana strategi pembangunan, geopolitik, lingkungan, dan demokrasi bertemu. Indonesia memiliki cadangan nikel yang besar dan menggunakan kebijakan hilirisasi untuk mendorong pengolahan domestik. Strategi ini bertujuan menangkap nilai tambah yang sebelumnya dinikmati di luar negeri.

Dari perspektif developmental economics, kebijakan tersebut berusaha memecahkan masalah commodity dependence. Dengan membangun smelter dan industri baterai, Indonesia berharap memperoleh manufacturing capability, teknologi, ekspor bernilai tinggi, dan lapangan kerja.

Namun keberhasilan hilirisasi tidak cukup diukur dari investasi. Industrial policy yang baik memiliki learning objective. Apakah perusahaan lokal menjadi supplier? Apakah engineer Indonesia memperoleh capability baru? Apakah R&D domestik berkembang? Apakah technological complexity meningkat?

Demokrasi relevan karena industri ekstraktif memiliki externalities. Tambang dan smelter memengaruhi lahan, air, udara, dan komunitas. Environmental monitoring harus independen dan data terbuka.

Pekerja juga stakeholder. Industrial expansion harus diikuti occupational safety, skill development, dan labor rights. Produktivitas jangka panjang sulit dibangun bila human capital tidak dihargai.

Daerah penghasil menghadapi paradox: PDRB dapat meningkat tajam tetapi kesejahteraan lokal tidak otomatis mengikuti. Local content dan fiscal transfers perlu dirancang agar manfaat menyebar.

Kebijakan insentif investor perlu transparan. Tax holiday dapat justified jika menghasilkan spillover, tetapi pemerintah harus mengevaluasi additionality: apakah investasi benar-benar tidak akan terjadi tanpa insentif?

Competition juga penting. Jika akses tambang, energi, atau kawasan terlalu terkonsentrasi, value chain dapat dikuasai segelintir aktor.

Geopolitik menambah kompleksitas. Rantai baterai terhubung dengan China, pasar Barat, aturan perdagangan, dan kebijakan iklim. Indonesia perlu diversifikasi kemitraan dan meningkatkan bargaining power melalui capability, bukan hanya resource ownership.

Transisi teknologi juga cepat. Kimia baterai dapat berubah dan mengurangi intensitas nikel. Karena itu, strategi tidak boleh bergantung pada satu teknologi. Investasi R&D dan recycling penting.

Demokrasi membantu strategi industri melalui scrutiny. Parlemen, media, akademisi, dan masyarakat dapat menilai apakah kebijakan menghasilkan manfaat. Tetapi debat harus berbasis data, bukan sekadar nasionalisme atau anti-investasi.

Dalam management terms, hilirisasi adalah portfolio strategy. Negara mengalokasikan policy capital pada sektor tertentu. Maka harus ada stage-gates dan exit criteria. Program yang tidak menghasilkan learning harus diperbaiki.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa strong state intervention dapat kompatibel dengan demokrasi jika governance kuat. Industrial policy tidak harus opaque.

Justru karena negara memberi privilege dan insentif, accountability harus lebih tinggi. Semakin besar discretionary industrial policy, semakin besar risiko rent seeking.

Jika Indonesia mampu mengubah nikel menjadi platform technological capability, hilirisasi dapat memperkuat pembangunan. Jika hanya memindahkan lokasi pemrosesan tanpa capability transfer, manfaat jangka panjang lebih terbatas.

Democratic governance menentukan apakah keuntungan saat ini diterjemahkan menjadi public value.

44. Studi Kasus Konseptual III: Perlindungan Sosial, DTSEN, dan Demokrasi Data

Perlindungan sosial merupakan area di mana pembangunan dan demokrasi berhubungan langsung dengan kehidupan rumah tangga. Program bantuan tunai, pangan, kesehatan, dan pendidikan bertujuan melindungi warga rentan serta menjaga human capital.

Tantangan utama adalah targeting. Negara perlu mengetahui siapa yang miskin, rentan, atau mengalami shock. Data yang tidak akurat menghasilkan exclusion error dan inclusion error.

Integrasi basis data sosial seperti DTSEN diarahkan untuk memperbaiki konsistensi dan pemutakhiran data. Dari sudut manajemen, ini adalah master data management pada skala negara.

Namun data sosial memiliki dimensi demokrasi. Warga harus memiliki mekanisme untuk mengoreksi data jika salah. Eligibility tidak boleh menjadi black box. Criteria harus transparan.

Dynamic poverty juga penting. Rumah tangga dapat masuk-keluar kemiskinan akibat kehilangan pekerjaan, sakit, bencana, atau harga. Sistem statis mudah tertinggal.

Digital integration memungkinkan near-real-time updates melalui data administrasi, tetapi privacy risk meningkat. Data kesehatan, pendapatan, dan keluarga sangat sensitif.

Governance membutuhkan separation of roles: siapa mengumpulkan, siapa menentukan eligibility, siapa menyalurkan, siapa mengaudit.

Grievance redress merupakan komponen demokratis. Warga bukan penerima pasif; mereka memiliki hak untuk meminta penjelasan.

Perlindungan sosial juga dapat dipolitisasi. Program populer dapat dikaitkan dengan credit claiming. Untuk mengurangi risiko, eligibility harus rule-based dan branding institusional lebih kuat daripada personal.

Bansos bukan substitusi pekerjaan produktif. Ia adalah floor. Development strategy harus memiliki pathway dari assistance menuju capability melalui kesehatan, pendidikan, skill, dan employment.

Program seperti BPJS PBI, PKH, Program Sembako, dan bantuan pendidikan memiliki fungsi berbeda. Integrasi data membantu mencegah fragmentation.

Evaluasi harus melihat outcome: school attendance, nutrition, health access, resilience, bukan hanya penyerapan anggaran.

Demokrasi data berarti warga memahami dasar keputusan algoritmik atau administratif. Tidak semua formula harus sederhana, tetapi harus explainable.

Bagi kepercayaan publik, fairness lebih penting daripada kesempurnaan statistik. Sistem yang 95 persen akurat tetapi tidak memiliki mekanisme koreksi dapat dianggap tidak adil.

AI dapat membantu mendeteksi anomaly dan fraud, tetapi tidak boleh menggantikan human judgement pada kasus kompleks.

Studi kasus perlindungan sosial menunjukkan bahwa state capacity dan citizen rights tidak saling bertentangan. Data yang baik meningkatkan efisiensi; grievance mechanism meningkatkan legitimasi.

Ketika warga melihat bantuan disalurkan berdasarkan kebutuhan, bukan koneksi politik, demokrasi memperoleh trust.

Sebaliknya, jika data menjadi instrumen kontrol atau distribusi partisan, kapasitas teknologi dapat merusak demokrasi.

Karena itu, pembangunan digital membutuhkan democratic data governance.

45. Studi Kasus Konseptual IV: Pendidikan, Perguruan Tinggi, dan Kebebasan Akademik

Pendidikan adalah investasi pembangunan paling penting sekaligus institusi demokrasi. Sekolah dan universitas membangun human capital, tetapi juga membentuk citizenship, critical thinking, dan capacity to deliberate.

Pertumbuhan produktivitas Indonesia sangat bergantung pada kualitas learning. Enrollment yang tinggi tidak cukup jika kompetensi literasi, numerasi, sains, dan problem solving rendah.

Demokrasi memberi ruang bagi inovasi pendidikan melalui otonomi dan pluralisme. Namun otonomi harus disertai accountability.

Perguruan tinggi memiliki fungsi khusus sebagai tempat knowledge criticism. Kebebasan akademik memungkinkan teori dan kebijakan diuji tanpa takut pada kesimpulan yang tidak populer.

Dari perspektif ekonomi, freedom of inquiry meningkatkan innovation. Penemuan ilmiah sering datang dari pertanyaan yang menantang consensus.

Universitas juga menghasilkan policy feedback. Pemerintah membutuhkan kritik akademik untuk menghindari groupthink.

Namun kebebasan akademik bukan kebebasan dari standar. Integritas ilmiah, peer review, ethics, dan evidence tetap diperlukan.

AI generatif menambah tantangan. Mahasiswa dapat menghasilkan teks cepat, tetapi pendidikan harus beralih dari memorization ke reasoning.

Demokrasi pendidikan berarti akses yang fair. Ketimpangan kualitas sekolah dapat menghasilkan inequality of political voice karena pendidikan memengaruhi kemampuan memahami isu.

Pendanaan riset yang terlalu tergantung pada prioritas jangka pendek dapat mengurangi basic research. Negara perlu portfolio antara mission-oriented dan curiosity-driven research.

Hubungan universitas-industri penting untuk innovation, tetapi conflict of interest harus transparan.

Pendidikan kewargaan juga perlu diperbarui. Generasi digital membutuhkan media literacy, argumentation, dan statistical literacy.

Kampus dapat menjadi miniatur demokrasi yang sehat: debat keras tetapi menghormati evidence dan manusia.

Jika perguruan tinggi kehilangan ruang inquiry, ekonomi pengetahuan juga dirugikan.

Indonesia Emas 2045 membutuhkan universitas yang bukan hanya mencetak ijazah, tetapi menghasilkan knowledge, entrepreneurship, dan civic leadership.

Dalam konteks artikel ini, pendidikan adalah mekanisme utama yang membuat pembangunan memperkuat demokrasi. Pendapatan tanpa pendidikan mungkin tidak menghasilkan partisipasi berkualitas. Pendidikan tanpa kesempatan ekonomi dapat menghasilkan frustrasi.

Keduanya harus dihubungkan melalui labor market reform dan innovation ecosystem.

46. Media Sosial, Polarisasi, dan Ekonomi Perhatian

Demokrasi kontemporer beroperasi dalam attention economy. Platform digital memperoleh pendapatan dari engagement, sementara konten yang memicu emosi sering menghasilkan engagement tinggi. Ini menciptakan tension antara business model platform dan kualitas deliberasi.

Indonesia memiliki populasi pengguna media sosial yang sangat besar. Platform menjadi sumber berita, ruang kampanye, marketplace, dan arena identitas.

Manfaatnya besar: barrier to publication turun, warga dapat mengawasi pejabat, UMKM dapat menjangkau konsumen, dan informasi menyebar cepat.

Tetapi disinformasi juga menyebar cepat. Algorithmic amplification dapat menciptakan echo chambers.

Polarisasi politik memiliki biaya ekonomi. Jika konsumen, pekerja, atau perusahaan membuat keputusan berdasarkan identitas politik, social trust menurun.

Misinformation tentang ekonomi dapat memicu panic atau kebijakan populis. Financial literacy menjadi penting.

Regulasi platform sulit. Terlalu lemah membiarkan harm, terlalu kuat dapat membatasi speech. Solusi membutuhkan co-regulation, transparency, due process, dan research access.

Platform harus lebih transparan mengenai political advertising dan recommender systems. Namun trade secrets juga perlu dihormati.

Literasi digital tidak cukup jika incentives platform tidak berubah. Systemic solution perlu menggabungkan user education dan platform accountability.

Media tradisional juga menghadapi tekanan revenue. Penurunan jurnalisme profesional dapat mengurangi investigative capacity.

Public interest journalism mungkin membutuhkan model pendanaan baru tanpa mengorbankan independensi.

Ekonomi perhatian mengajarkan bahwa demokrasi memiliki infrastructure. Dulu infrastructure itu ruang publik fisik dan media; sekarang juga algorithmic systems.

Governance digital karena itu menjadi bagian dari economic governance. Platform adalah perusahaan sekaligus quasi-public sphere.

Indonesia perlu membangun regulator yang kompeten secara teknologi dan independen.

Researcher access to platform data dapat membantu memahami disinformasi tanpa membuka data pribadi.

Dalam jangka panjang, kualitas democracy depends on information quality. Dan kualitas economy juga bergantung pada information quality.

Pasar bekerja buruk jika informasi asimetris; demokrasi bekerja buruk jika informasi terdistorsi.

47. Kepercayaan Publik sebagai Modal Ekonomi dan Politik

Trust sering dianggap konsep lunak, tetapi memiliki konsekuensi ekonomi yang nyata. Masyarakat dengan trust tinggi dapat melakukan transaksi dengan biaya lebih rendah. Perusahaan membutuhkan lebih sedikit kontrol, kontrak lebih sederhana, dan kerja sama lebih mudah.

Political trust juga penting. Warga lebih mungkin mengikuti kebijakan sulit jika percaya pemerintah kompeten dan fair. Contoh paling jelas terlihat saat krisis kesehatan atau reformasi subsidi.

Namun trust tidak boleh diartikan sebagai dukungan tanpa kritik. Demokrasi sehat membutuhkan informed trust dan institutional trust, bukan personal loyalty.

Trust dibangun melalui consistency, competence, transparency, dan fairness. Satu skandal dapat merusak trust yang dibangun lama.

Indonesia memiliki masyarakat dengan social capital yang kuat dalam banyak komunitas, tercermin dalam gotong royong. Tantangannya adalah mengubah interpersonal trust menjadi institutional trust.

Korupsi merusak trust karena menunjukkan aturan dapat dibeli. Ketidakpastian hukum merusak trust karena outcome sulit diprediksi.

Ketimpangan juga memengaruhi trust. Jika masyarakat merasa sistem rigged, kerja sama menurun.

Digital misinformation dapat mengikis trust bahkan ketika institusi bekerja cukup baik. Pemerintah perlu proactive communication.

Tetapi propaganda bukan solusi. Komunikasi yang hanya menampilkan keberhasilan dapat mengurangi credibility ketika warga melihat masalah.

Transparency about uncertainty justru dapat meningkatkan trust. Dalam manajemen krisis, pemimpin yang menjelaskan apa yang diketahui dan belum diketahui sering lebih dipercaya.

Trust juga berkaitan dengan tax compliance. Warga membayar jika percaya dana digunakan baik.

Perusahaan memilih investasi jangka panjang jika percaya rules stable.

Demokrasi menyediakan trust-building mechanisms: audit, elections, courts, press. Jika mekanisme itu kredibel, trust tidak harus bergantung pada individu.

Pembangunan yang meningkatkan layanan juga membangun trust. Ini menciptakan virtuous cycle.

Namun vicious cycle juga mungkin: layanan buruk menurunkan trust, compliance turun, kapasitas negara turun, layanan semakin buruk.

Karena itu, trust dapat diperlakukan sebagai strategic asset negara. Pemerintah perlu mengukurnya dan memahami drivers.

Survei trust sebaiknya dikaitkan dengan pengalaman layanan, bukan hanya approval politik.

Dalam konteks Indonesia, menjaga trust selama transformasi ekonomi sangat penting karena reformasi akan menciptakan disruption.

48. Pembangunan yang Berkeadilan sebagai Strategi Ketahanan Demokrasi

Keadilan sosial sering dipandang sebagai tujuan moral, tetapi juga merupakan strategi stabilitas institusional. Sistem politik lebih tahan jika mayoritas warga merasa memiliki stake dalam keberhasilan ekonomi.

Inequality yang terlalu tinggi dapat menciptakan dua risiko. Kelompok bawah kehilangan kepercayaan karena merasa tertinggal; kelompok atas menggunakan sumber daya untuk mempertahankan privilege.

Pembangunan berkeadilan bukan berarti semua outcome sama. Ia menekankan equal opportunity, social protection, dan fair rules.

Indonesia menghadapi ketimpangan regional yang besar karena geografi. Infrastruktur dan transfer fiskal membantu, tetapi human capital tetap penting.

Keadilan juga memiliki dimensi gender. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja, leadership, dan entrepreneurship meningkatkan growth potential.

Disability inclusion, minority access, dan rural connectivity juga bagian productivity agenda.

Informal employment adalah tantangan utama. Pekerja informal sering tidak memiliki perlindungan dan productivity rendah.

Formalization harus dibuat beneficial, bukan hanya compliance burden. UMKM akan formal jika akses kredit, procurement, dan pasar meningkat.

Social insurance perlu portable karena pekerjaan semakin fleksibel.

Housing affordability memengaruhi kelas menengah urban. Kota yang mahal dapat mengurangi mobility.

Transportasi publik meningkatkan equality of access karena menghubungkan pekerja dengan pekerjaan.

Digital access menjadi basic infrastructure. Namun affordability dan skill harus diperhatikan.

Keadilan antargenerasi membutuhkan pendidikan berkualitas dan fiscal sustainability.

Climate justice penting karena kelompok miskin paling rentan terhadap bencana.

Demokrasi memberi ruang untuk menegosiasikan semua distribusi tersebut. Tetapi kelompok rentan sering kurang terorganisasi.

Karena itu, policy design harus melakukan distributional impact assessment.

Setiap proyek besar seharusnya menjawab siapa mendapat benefit dan siapa menanggung cost.

Pembangunan yang berkeadilan memperkuat demokrasi karena menurunkan demand for anti-system alternatives.

Sebaliknya, demokrasi memperkuat keadilan jika representation berjalan baik.

Hubungan tersebut adalah inti social contract modern.

Bagi Indonesia, keberhasilan 2045 seharusnya tidak hanya berupa masuk kelompok high income, tetapi high opportunity society.

Masyarakat seperti itu memberi warga alasan rasional untuk mempertahankan institusi demokrasi.

49. Rekomendasi Strategis Bertahap: 2026-2030, 2030-2035, dan 2035-2045

Agenda penguatan demokrasi dan pembangunan perlu dibagi menurut horizon agar tidak menjadi daftar harapan.

Pada 2026-2030, prioritas adalah memperkuat fondasi. Rule of law, regulatory predictability, data governance, procurement transparency, dan merit bureaucracy harus diperkuat. Reformasi pembiayaan politik perlu dimulai dengan disclosure yang lebih baik. Productivity agenda fokus pada learning outcome, vocational alignment, logistics, competition, dan digital infrastructure. Perlindungan sosial perlu menggunakan data terpadu dengan grievance mechanism kuat.

Pada horizon ini, Indonesia juga harus menjaga macro credibility. Fiscal discipline dan inflation management memberi ruang bagi reformasi. Program besar perlu memiliki independent evaluation.

Pada 2030-2035, fokus bergeser ke scaling innovation. R&D intensity perlu meningkat, hubungan universitas-industri diperkuat, dan high-value services dikembangkan. Rule of law menjadi semakin penting karena innovation economy bergantung intangible assets.

Demokrasi harus memperdalam deliberative capacity. Open policy modeling dan participatory budgeting dapat digunakan untuk isu tertentu. Parliament research capacity perlu diperkuat agar oversight lebih substantif.

Urban governance menjadi sentral karena mayoritas penduduk akan semakin urban. Metropolitan coordination diperlukan untuk housing, transport, air quality, dan water.

Pada 2035-2045, Indonesia harus mempersiapkan aging dan post-demographic-dividend economy. Productivity per worker menjadi kritis. Automation dapat membantu, tetapi social protection harus adaptif.

Demokrasi juga menghadapi generational transition. Pemimpin yang dibentuk setelah Reformasi akan dominan. Institutional memory perlu dijaga.

Climate adaptation menjadi biaya besar. Long-term fiscal institutions harus mampu mengalokasikan sumber daya lintas generasi.

Pada 2045, ukuran sukses adalah apakah Indonesia mencapai high-income status dengan social cohesion dan institutions yang tetap terbuka.

Reformasi bertahap harus memiliki sequencing. Misalnya, menghapus subsidi sebelum safety net siap dapat menciptakan backlash. Digitalisasi sebelum privacy framework dapat menciptakan distrust.

Change management nasional memerlukan coalition building. Reformasi yang menguntungkan masyarakat luas sering kalah oleh kelompok kecil yang menanggung kerugian besar dan lebih terorganisasi.

Karena itu, compensating losers dan communicating benefits merupakan strategi penting.

Data dan evidence harus digunakan untuk menjaga reformasi dari misinformation.

Leadership juga penting, tetapi institusi harus lebih kuat daripada individu.

Strategi yang terlalu bergantung pada charismatic leadership tidak sustainable.

Indonesia perlu institutionalize strategic planning tanpa membuatnya rigid.

Adaptive governance berarti tujuan jangka panjang konsisten tetapi instrumen dapat berubah.

Demokrasi membantu adaptasi melalui feedback.

Pembangunan membantu demokrasi melalui resources.

Roadmap bertahap tersebut bertujuan menciptakan institutional compounding: perbaikan kecil yang terus menumpuk menjadi kapasitas besar.

50. Penutup Akhir: Indonesia di Persimpangan antara Kecepatan dan Kedalaman

Indonesia berada dalam posisi yang secara historis jarang dimiliki: demokrasi elektoral yang telah bertahan lebih dari dua dekade, ekonomi besar yang relatif stabil, populasi produktif, sumber daya alam strategis, dan peluang digital yang luas. Kombinasi ini memberikan kemungkinan menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi yang penting pada pertengahan abad.

Namun peluang bukan kepastian. Pertumbuhan lima persen dapat menjaga kemajuan tetapi mungkin tidak cukup jika produktivitas tidak meningkat. Demokrasi elektoral dapat menjaga pergantian kekuasaan tetapi belum tentu cukup jika accountability melemah.

Tantangan Indonesia dapat diringkas sebagai tension antara speed dan depth. Negara ingin bergerak cepat: membangun infrastruktur, menarik investasi, melakukan hilirisasi, dan merespons geopolitik. Namun pembangunan mendalam memerlukan institusi yang sering tumbuh lambat: trust, law, education, professional bureaucracy, dan norms of accountability.

Kecepatan tanpa kedalaman dapat menghasilkan proyek. Kedalaman tanpa kemampuan eksekusi dapat menghasilkan prosedur. Indonesia membutuhkan keduanya.

Dalam manajemen, perusahaan yang hanya mengejar quarterly results dapat mengorbankan capability. Negara yang hanya mengejar headline growth dapat melakukan hal serupa.

Demokrasi berfungsi seperti governance board yang memastikan strategi tidak hanya cepat tetapi legitimate. Pembangunan berfungsi seperti operating system yang menghasilkan hasil nyata.

Jika board terlalu lemah, management dapat overreach. Jika operation lemah, governance kehilangan credibility.

Hubungan ini menunjukkan bahwa pertanyaan artikel—apakah demokrasi dan pembangunan masih berjalan seiring—tidak dapat dijawab sekali untuk selamanya. Jawabannya harus diperbarui melalui data dan evaluasi institusi.

Pada 2025-2026, bukti menunjukkan ekonomi Indonesia tetap resilien sementara penilaian terhadap kualitas demokrasi lebih mixed. Ini bukan alasan untuk fatalisme. Justru merupakan early warning bahwa economic performance tidak boleh digunakan untuk menunda institutional improvement.

BPS menunjukkan kemajuan kemiskinan dan IPM. Bank Dunia menunjukkan kebutuhan pekerjaan lebih baik dan productivity reform. Indikator demokrasi menunjukkan perlunya perhatian pada kualitas kebebasan dan institutions.

Semua sinyal tersebut dapat dipadukan menjadi satu agenda: higher productivity, broader opportunity, stronger accountability.

Indonesia juga perlu menghindari false comparison dengan negara lain. Ada negara otoriter yang sukses dan gagal; ada demokrasi sukses dan gagal. Variabel kunci adalah kualitas institusi, kapasitas belajar, dan kemampuan mengelola konflik.

Demokrasi memberi Indonesia mekanisme belajar yang berharga. Kritik, pemilu, media, akademisi, dan civil society adalah sensors. Pemerintah yang cerdas tidak mematikan sensor; ia menggunakan sensor untuk memperbaiki sistem.

Pembangunan memberi Indonesia kemampuan finansial untuk memperkuat institusi. Pertumbuhan menciptakan tax base yang dapat membiayai education, courts, digital systems, dan social protection.

Karena itu, keduanya dapat menjadi complementary assets.

Indonesia tidak harus memilih antara “demokrasi yang ramai” dan “pembangunan yang cepat”. Negara dapat merancang proses yang cepat tetapi transparan, partisipatif tetapi terstruktur, dan kuat tetapi terbatas oleh hukum.

Ini memerlukan leadership yang memahami bahwa constraints bukan selalu hambatan. Dalam corporate governance, audit dan board oversight melindungi perusahaan dari keputusan buruk. Dalam negara, institutions melakukan fungsi serupa.

Pada akhirnya, pembangunan adalah proses meningkatkan kapasitas manusia dan organisasi. Demokrasi adalah proses memastikan kapasitas tersebut digunakan secara sah dan dapat dikoreksi.

Jika Indonesia mampu mempertahankan keduanya, target 2045 akan memiliki makna lebih dalam daripada statistik pendapatan. Indonesia akan menjadi negara yang tidak hanya lebih kaya, tetapi juga lebih capable, fair, trusted, dan resilient.

Itulah jawaban normatif sekaligus strategis: demokrasi dan pembangunan harus dibuat berjalan seiring, karena masa depan yang kuat memerlukan keduanya.

51. Lampiran Analitis A: Matriks Hubungan Demokrasi dan Pembangunan

Untuk keperluan pengajaran dan penelitian, hubungan demokrasi dan pembangunan dapat dipetakan dalam matriks empat kuadran. Sumbu horizontal menggambarkan kualitas demokrasi dari rendah ke tinggi, sedangkan sumbu vertikal menggambarkan kualitas pembangunan dari rendah

ke tinggi. Matriks ini tidak dimaksudkan untuk memberi label permanen kepada negara, tetapi membantu memahami dinamika.

Kuadran pertama adalah high democracy-high development. Negara dalam posisi ini memiliki institusi demokrasi relatif kuat, pendapatan tinggi, pelayanan publik baik, dan rule of law yang mapan. Tantangannya bukan lagi membangun institusi dasar, tetapi menjaga responsiveness, innovation, dan sustainability. Risiko dapat muncul dari populisme, aging, inequality, atau technological disruption.

Kuadran kedua adalah low democracy-high development. Beberapa negara dapat tumbuh cepat dengan pemerintahan yang terkonsentrasi. Keunggulannya adalah coordination capacity, tetapi risikonya adalah succession uncertainty, information distortion, dan limited correction. Jika keputusan pusat salah, feedback dapat terlambat.

Kuadran ketiga adalah high democracy-low development. Sistem politik terbuka tetapi state capacity atau struktur ekonomi lemah. Tantangannya adalah democratic disappointment. Warga memiliki suara tetapi hasil pembangunan tidak memadai. Kondisi ini dapat memicu dukungan pada strongman politics.

Kuadran keempat adalah low democracy-low development, situasi paling berisiko karena kekuasaan terkonsentrasi sekaligus kapasitas ekonomi rendah. Konflik dan rent extraction dapat saling memperkuat.

Indonesia setelah Reformasi secara umum bergerak menuju demokrasi elektoral dengan pembangunan menengah. Tantangan sekarang adalah bergerak ke arah high-quality democracy dan high-productivity economy secara simultan. Gerakan pada satu dimensi tanpa yang lain menciptakan risiko.

Matriks tersebut dapat diperluas dengan variabel ketiga: state capacity. Dua negara dengan skor demokrasi serupa dapat memiliki outcome ekonomi berbeda karena kapasitas birokrasi berbeda. Karena itu, state capacity adalah moderator penting.

Variabel keempat adalah distributional inclusion. Pertumbuhan tinggi yang sangat terkonsentrasi memiliki implikasi politik berbeda dibanding pertumbuhan yang luas.

Dalam penelitian, mahasiswa dapat membangun model: democratic quality memengaruhi development performance melalui governance quality, dengan state capacity sebagai moderator dan inequality sebagai feedback variable.

Hipotesis dapat berupa: semakin tinggi accountability, semakin tinggi government effectiveness jika bureaucratic capacity tinggi. Artinya demokrasi tidak cukup; kapasitas menentukan apakah voice dapat diterjemahkan menjadi service.

Hipotesis lain: pertumbuhan ekonomi memperkuat dukungan pada demokrasi jika mobilitas sosial meningkat, tetapi efeknya melemah jika inequality of opportunity tinggi.

Model tersebut dapat diuji menggunakan data provinsi atau lintas negara. Pada tingkat Indonesia, data BPS, IDI, audit, investasi, kemiskinan, dan pelayanan dapat digunakan.

Pendekatan longitudinal lebih baik daripada cross-sectional karena institusi bekerja melalui lag.

Matriks juga membantu kebijakan. Jika masalah utama daerah adalah state capacity rendah, solusinya training dan administrative reform. Jika masalahnya accountability, transparansi dan participation lebih relevan. Jika keduanya lemah, reformasi harus simultan.

Dengan demikian, hubungan demokrasi dan pembangunan tidak satu dimensi. Ia merupakan konfigurasi institusional.

52. Lampiran Analitis B: Indikator yang Perlu Dipantau Indonesia

Untuk menilai apakah demokrasi dan pembangunan berjalan seiring, Indonesia membutuhkan indikator yang cukup sederhana untuk dipahami publik tetapi cukup kaya untuk diagnosis. Berikut adalah beberapa kelompok indikator yang dapat menjadi dashboard tahunan.

Kelompok pertama adalah pertumbuhan dan produktivitas. Indikator meliputi pertumbuhan PDB riil, PDB per kapita, total factor productivity, investasi swasta, ekspor manufaktur bernilai tambah, dan produktivitas tenaga kerja. Pertumbuhan yang berasal dari produktivitas lebih sustainable daripada sekadar penambahan modal.

Kelompok kedua adalah kualitas pekerjaan. Tingkat pengangguran saja tidak cukup. Perlu real wage growth, formal employment share, social protection coverage, youth NEET, underemployment, dan middle-class wage share.

Kelompok ketiga adalah inclusion. Poverty rate, extreme poverty, Gini, intergenerational mobility, regional disparity, gender gap, dan access to basic services.

Kelompok keempat adalah human capital. Learning-adjusted years of schooling, stunting, life expectancy, tertiary completion, STEM skill, digital literacy, dan research output.

Kelompok kelima adalah rule of law. Case duration, contract enforcement time, perception of judicial independence, regulatory consistency, dan corruption complaints resolved.

Kelompok keenam adalah democratic quality. Electoral competitiveness, participation, civil liberties, media pluralism, civic space, parliamentary oversight, dan subnational democracy.

Kelompok ketujuh adalah government effectiveness. Service delivery time, procurement efficiency, digital service uptake, tax compliance, audit findings, and policy implementation rates.

Kelompok kedelapan adalah trust. Trust in institutions, perceived fairness, satisfaction with services, and willingness to comply with rules.

Kelompok kesembilan adalah sustainability. Emissions intensity, renewable share, air quality, deforestation, water stress, climate vulnerability, dan disaster resilience.

Kelompok kesepuluh adalah digital rights and capability. Internet access, affordability, data breaches, cybersecurity maturity, platform transparency, and AI governance readiness.

Dashboard harus menyertakan distribution. Rata-rata dapat menipu. Data perlu dibedakan berdasarkan gender, wilayah, income group, dan urban-rural.

Setiap indikator juga perlu benchmark. Angka 5 persen growth hanya bermakna jika dibandingkan potential growth dan negara peers.

Trend lebih penting daripada satu titik. Demokrasi dan pembangunan perlu dilihat setidaknya dalam horizon lima sampai sepuluh tahun.

Indikator harus independent and auditable. BPS memiliki peran sentral, tetapi data dari lembaga lain dapat melengkapi.

Metodologi harus stabil agar tren dapat dibandingkan. Jika berubah, bridge estimates diperlukan.

Publik perlu akses raw data sejauh memungkinkan dengan privacy protection.

Dashboard bukan ranking politik. Tujuannya adalah strategic learning.

Pemerintah dapat menetapkan red flags. Misalnya, jika real wages turun tiga tahun meski PDB tumbuh, policy review dilakukan. Jika trust turun bersamaan dengan service complaints, root cause analysis dimulai.

Dengan mekanisme seperti ini, demokrasi menjadi continuous feedback system, bukan hanya event lima tahunan.

53. Lampiran Analitis C: Pertanyaan Diskusi untuk Mahasiswa Manajemen

Topik demokrasi dan pembangunan cocok digunakan dalam kelas Strategic Management, Business Ethics, Corporate Governance, Public Policy, dan Leadership. Berikut sejumlah pertanyaan diskusi yang dapat mendorong analytical thinking.

Pertanyaan pertama: apakah perusahaan seharusnya peduli terhadap kualitas demokrasi selama pasar tetap tumbuh? Mahasiswa perlu mempertimbangkan reputational risk, regulatory risk, talent attraction, innovation, dan long-term stability.

Pertanyaan kedua: apakah regulatory certainty lebih penting daripada democratic openness bagi investor? Jawaban perlu membedakan short-term investment dengan long-term knowledge-intensive investment.

Pertanyaan ketiga: dapatkah kebijakan industri yang memberi insentif besar kepada sektor tertentu tetap dianggap fair? Mahasiswa dapat menggunakan konsep market failure, externality, learning spillover, dan rent seeking.

Pertanyaan keempat: apakah kecepatan pengambilan keputusan selalu meningkatkan performance? Bandingkan startup founder-led dengan public company governance.

Pertanyaan kelima: bagaimana perusahaan harus bertindak jika memperoleh peluang bisnis dari regulasi yang legal tetapi dianggap tidak fair? Ini membuka isu ethics beyond compliance.

Pertanyaan keenam: apakah CEO perusahaan besar memiliki tanggung jawab menjaga democratic institutions? Mahasiswa dapat membahas stakeholder capitalism dan corporate political activity.

Pertanyaan ketujuh: kapan lobbying legitimate dan kapan menjadi capture? Kriteria dapat mencakup transparency, access equality, dan public interest.

Pertanyaan kedelapan: apakah media sosial meningkatkan atau menurunkan kualitas demokrasi? Analisis business model platform.

Pertanyaan kesembilan: bagaimana AI dapat digunakan pemerintah tanpa melanggar due process? Buat governance framework.

Pertanyaan kesepuluh: apakah bantuan sosial memperkuat demokrasi atau menciptakan clientelism? Jawab dengan membedakan program berbasis hak dan distribusi discretionary.

Pertanyaan kesebelas: apakah pertumbuhan ekonomi 5 persen cukup bagi Indonesia? Mahasiswa perlu menghitung kebutuhan productivity dan income convergence.

Pertanyaan kedua belas: jika demokrasi menghasilkan kebijakan yang kurang efisien, apakah hasil itu tetap legitimate? Diskusikan distinction antara procedural dan substantive legitimacy.

Pertanyaan ketiga belas: apakah perusahaan lebih inovatif dalam lingkungan yang bebas? Cari mekanisme psychological safety dan knowledge flow.

Pertanyaan keempat belas: bagaimana ketimpangan ekonomi memengaruhi competition? Pertimbangkan access to capital dan regulatory influence.

Pertanyaan kelima belas: apakah BUMN seharusnya dinilai dengan KPI finansial yang sama seperti swasta? Bahas public value.

Pertanyaan keenam belas: bagaimana merancang Balanced Scorecard nasional yang memasukkan demokrasi? Hindari reduksi rights menjadi angka semata.

Pertanyaan ketujuh belas: apa indikator paling awal bahwa institutional decline akan mulai memengaruhi economy? Kandidat: capital flight, risk premium, innovation slowdown, corruption, talent migration.

Pertanyaan kedelapan belas: bagaimana generasi muda dapat menjaga demokrasi tanpa mengorbankan fokus pada karier dan ekonomi? Bahas civic participation yang efisien.

Pertanyaan kesembilan belas: apakah kritik publik terhadap proyek strategis nasional membantu atau menghambat manajemen proyek? Bedakan constructive challenge dan misinformation.

Pertanyaan kedua puluh: jika harus memilih satu reformasi yang memperkuat demokrasi sekaligus ekonomi, apa pilihannya? Rule of law, education, political finance, bureaucracy, atau competition policy?

Tujuan pertanyaan tersebut bukan menghasilkan jawaban tunggal, tetapi melatih kemampuan melihat trade-off, stakeholders, time horizon, dan unintended consequences.

Dalam kelas, mahasiswa dapat dibagi menjadi kelompok pemerintah, bisnis, civil society, pekerja, dan investor. Setiap kelompok membuat policy memo. Setelah itu dilakukan negotiation simulation.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa democracy-development nexus sangat cocok untuk management education karena inti masalahnya adalah governance under complexity.

54. Lampiran Analitis D: Kerangka Penelitian Empiris untuk Indonesia

Sebuah penelitian empiris dapat dirancang dengan judul “Kualitas Demokrasi, Kapasitas Pemerintah, dan Pembangunan Inklusif pada Provinsi di Indonesia”. Unit analisis adalah provinsi dan periode dapat mencakup beberapa tahun agar membentuk panel.

Variabel independen utama adalah kualitas demokrasi, yang dapat dioperasionalisasi menggunakan komponen IDI atau indikator lain yang tersedia konsisten. Peneliti harus memperhatikan perubahan metodologi.

Variabel mediator adalah government effectiveness atau corruption control. Karena indikator langsung mungkin terbatas, proxy dapat berupa kualitas audit, digital service, belanja outcome, atau indeks pelayanan publik.

Variabel moderator adalah state capacity, misalnya fiscal capacity, bureaucratic quality, atau educational level of civil service.

Variabel dependen dapat berupa pertumbuhan PDRB per kapita, kemiskinan, inequality, IPM, investasi, atau composite inclusive development index.

Model dasar: Democracy Quality → Government Effectiveness → Inclusive Development. State Capacity memoderasi hubungan Democracy → Government Effectiveness.

Hipotesis pertama: kualitas demokrasi berhubungan positif dengan efektivitas pemerintah. Hipotesis kedua: efektivitas pemerintah berhubungan positif dengan pembangunan inklusif. Hipotesis ketiga: efek demokrasi terhadap efektivitas lebih kuat pada provinsi dengan kapasitas birokrasi tinggi.

Namun model menghadapi endogeneity. Daerah kaya mungkin memiliki demokrasi lebih baik. Peneliti dapat menggunakan lagged independent variables, fixed effects, atau dynamic panel.

Spatial dependence juga penting karena provinsi bertetangga dapat saling memengaruhi. Spatial econometrics dapat dipertimbangkan.

PLS-SEM dapat digunakan jika tujuan predictive dan konstruk laten cukup kompleks, tetapi panel econometrics lebih cocok untuk causal inference waktu. Pemilihan metode harus mengikuti research question.

Studi kualitatif dapat melengkapi. Pilih empat provinsi: high democracy-high development, high democracy-low development, low democracy-high development, dan low-low. Lakukan comparative case study.

Wawancara dengan birokrat, DPRD, bisnis, akademisi, dan masyarakat sipil dapat mengungkap mekanisme.

Data procurement dan budget dapat dianalisis menggunakan machine learning untuk menemukan anomaly.

Text analysis pada media lokal dapat mengukur civic discourse, tetapi validity perlu diuji.

Penelitian juga dapat membangun trust index melalui survei.

Kontribusi teori adalah menjelaskan bahwa demokrasi tidak langsung memengaruhi pembangunan; efeknya dimediasi governance dan dikondisikan capacity.

Kontribusi praktis adalah menunjukkan daerah mana yang membutuhkan reformasi accountability dan mana yang membutuhkan capacity building.

Ethics harus diperhatikan karena political data sensitif. Anonimitas informan penting.

Replication package dan open code meningkatkan credibility.

Dengan desain seperti ini, mahasiswa doktoral dapat mengubah debat normatif menjadi penelitian empiris yang rigorous.

55. Sintesis Final: Dua Mesin, Satu Negara

Seluruh pembahasan dapat diringkas melalui analogi dua mesin. Mesin pertama adalah mesin penciptaan nilai: ekonomi. Ia mengubah tenaga kerja, modal, sumber daya alam, teknologi, dan pengetahuan menjadi output serta kesejahteraan. Mesin kedua adalah mesin legitimasi dan koreksi: demokrasi. Ia mengubah preferensi, konflik, kritik, dan aspirasi menjadi keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jika mesin ekonomi kuat tetapi mesin demokrasi lemah, negara dapat bergerak cepat namun kehilangan sensor ketika arah keliru. Jika mesin demokrasi kuat tetapi ekonomi lemah, negara memiliki banyak feedback tetapi kekurangan kapasitas memenuhi harapan.

Indonesia membutuhkan sinkronisasi. State capacity adalah transmisi yang menghubungkan keduanya. Rule of law adalah rangka. Trust adalah pelumas. Human capital adalah bahan bakar berkualitas. Data adalah instrumen navigasi.

Analogi ini juga membantu memahami bahwa kerusakan tidak selalu terlihat segera. Mobil dapat terus bergerak meski oli berkurang. Ekonomi dapat tetap tumbuh meski institusi memburuk. Tetapi risiko meningkat.

Sebaliknya, perawatan institusi kadang tidak langsung meningkatkan kecepatan. Reformasi pengadilan atau pembiayaan politik mungkin tidak menambah PDB tahun depan, tetapi mengurangi risiko jangka panjang.

Manajemen strategis menekankan leading indicators dan lagging indicators. PDB adalah lagging indicator. Trust, rule of law, learning quality, dan investment confidence sering menjadi leading indicators.

Indonesia perlu mengelola keduanya.

Pada 2025, pertumbuhan 5,11 persen, kemiskinan 8,47 persen, Gini 0,375, dan IPM 75,90 adalah hasil penting. Mereka menunjukkan mesin ekonomi dan sosial terus bekerja.

Indikator demokrasi yang lebih mixed menunjukkan kebutuhan maintenance pada mesin governance.

Tidak tepat menyimpulkan Indonesia gagal demokrasi hanya dari satu indeks, sebagaimana tidak tepat menyimpulkan pembangunan berhasil sempurna hanya dari satu angka pertumbuhan.

Pendekatan akademik membutuhkan triangulasi.

Dalam jangka panjang, high-income economy membutuhkan high-capability institutions. Kompleksitas ekonomi akan meningkat. Perusahaan teknologi, pasar modal, riset, dan global supply chain memerlukan predictable rules.

Demokrasi yang matang dapat menyediakan predictability melalui depersonalized institutions.

Pada saat yang sama, demokrasi membutuhkan citizens yang memiliki waktu, pendidikan, dan security untuk berpartisipasi. Pembangunan menyediakan capability tersebut.

Hubungan keduanya karena itu bukan sekadar korelasi, tetapi mutual dependence.

Indonesia memiliki kesempatan membangun virtuous cycle. Setiap peningkatan pelayanan meningkatkan trust. Setiap peningkatan trust memudahkan reformasi. Setiap reformasi produktivitas meningkatkan fiscal capacity. Setiap peningkatan fiscal capacity memungkinkan investasi human capital. Human capital meningkatkan partisipasi berkualitas.

Vicious cycle juga mungkin. Corruption menurunkan trust, trust rendah menurunkan compliance, capacity melemah, service memburuk, frustration meningkat.

Kebijakan harus memperkuat loop pertama dan memutus loop kedua.

Kesimpulan artikel ini bukan bahwa demokrasi selalu menghasilkan pertumbuhan atau pertumbuhan selalu menghasilkan demokrasi. Kesimpulannya adalah bahwa Indonesia memerlukan arsitektur institusional yang membuat keduanya kompatibel.

Tugas generasi pemimpin berikutnya adalah membangun negara yang mampu bergerak cepat tanpa kehilangan kompas, kuat tanpa menjadi sewenang-wenang, dan makmur tanpa meninggalkan warga.

Bila itu tercapai, demokrasi dan pembangunan tidak hanya berjalan seiring. Keduanya menjadi dua sisi dari proyek nasional yang sama.

56. Perspektif yang Berbeda: Menimbang Argumen Pro-Pertumbuhan, Pro-Demokrasi, dan Perspektif Institusional

Perdebatan mengenai demokrasi dan pembangunan sering menjadi tidak produktif karena setiap pihak menggunakan ukuran keberhasilan yang berbeda. Untuk memperoleh analisis yang lebih seimbang, setidaknya ada tiga perspektif yang perlu ditempatkan dalam dialog: perspektif pro-pertumbuhan, perspektif pro-demokrasi, dan perspektif institusional.

Perspektif pro-pertumbuhan memulai analisis dari kebutuhan material. Negara berkembang memiliki keterbatasan modal, infrastruktur, teknologi, dan pekerjaan produktif. Karena itu, prioritas utama adalah meningkatkan investasi, produksi, ekspor, dan pendapatan. Dari sudut ini, proses politik yang terlalu panjang dapat dipandang sebagai transaction cost. Pemerintah memerlukan kemampuan koordinasi, eksekusi, dan continuity. Pendukung perspektif ini sering menekankan bahwa warga miskin membutuhkan pekerjaan dan layanan lebih mendesak daripada prosedur politik yang ideal.

Argumen tersebut tidak dapat diabaikan. Demokrasi yang gagal menghasilkan kebutuhan dasar memang berisiko kehilangan legitimasi. Warga tidak hidup dari prosedur saja. Infrastruktur, pekerjaan, harga stabil, kesehatan, dan pendidikan adalah kebutuhan nyata. Pemerintah juga harus mampu mengatakan “tidak” terhadap tuntutan yang tidak sustainable.

Namun perspektif pro-pertumbuhan memiliki kelemahan jika menganggap semua constraints sebagai hambatan. Dalam proyek korporasi, audit dapat memperlambat keputusan tetapi

melindungi perusahaan dari fraud. Due diligence membutuhkan waktu tetapi mengurangi risiko investasi. Demikian pula dalam negara, checks and balances dapat dilihat sebagai risk management.

Perspektif pro-demokrasi memulai dari hak dan pembatasan kekuasaan. Pembangunan dianggap meaningful jika warga memiliki agency dan voice. Dari sudut ini, pertumbuhan yang diperoleh melalui pembatasan hak memiliki biaya yang tidak tercermin dalam PDB.

Perspektif ini menekankan bahwa legitimasi prosedural memiliki nilai intrinsik. Warga adalah subjek pembangunan, bukan objek. Keputusan yang memengaruhi tanah, pekerjaan, atau lingkungan mereka memerlukan partisipasi.

Kelemahan perspektif pro-demokrasi muncul jika terlalu sedikit memperhatikan capacity dan trade-off. Partisipasi tanpa struktur dapat menghasilkan endless consultation. Rights membutuhkan pembiayaan. Kebijakan redistributif tanpa produktivitas dapat tidak sustainable.

Perspektif institusional mencoba menggabungkan keduanya. Ia bertanya bukan apakah negara harus kuat atau demokratis, tetapi bagaimana membuat kekuatan negara rule-bound dan accountable. Ia juga bertanya bukan apakah pasar atau negara lebih baik, tetapi institusi apa yang membuat keduanya produktif.

Dalam perspektif ini, speed adalah design problem. Proses dapat dipercepat dengan batas waktu, digital workflow, parallel review, dan standardized criteria tanpa menghapus oversight.

Participation juga dapat didesain. Tidak semua warga harus hadir dalam semua keputusan; representation, public comment, stakeholder panels, dan judicial review dapat digunakan.

Accountability tidak harus micromanagement. Board yang baik tidak menjalankan operasi, tetapi memastikan strategy, risk, dan integrity.

Indonesia membutuhkan perspektif institusional karena tantangannya bukan kekurangan demokrasi formal maupun kekurangan negara secara absolut, tetapi variasi kualitas institusi penghubung.

Sebagai contoh, investasi asing dapat dipercepat melalui one-stop service. Namun izin lingkungan dan konsultasi tetap harus credible. Solusinya adalah integrated process, bukan menghapus salah satu.

Pada perlindungan sosial, penargetan dapat menggunakan data canggih. Tetapi grievance mechanism tetap diperlukan. Solusinya adalah smart state with rights.

Pada keamanan digital, pemerintah perlu kemampuan melawan cybercrime. Tetapi surveillance harus memiliki legal safeguards. Solusinya adalah capable security with oversight.

Pada kebijakan industri, pemerintah dapat memilih sektor prioritas. Tetapi insentif harus measurable dan transparent. Solusinya adalah disciplined industrial policy.

Tiga perspektif ini juga membantu membaca indikator. Kelompok pro-pertumbuhan akan menekankan PDB 5,11 persen dan penurunan kemiskinan. Kelompok pro-demokrasi akan menekankan skor kebebasan dan kualitas checks and balances. Perspektif institusional mengatakan keduanya adalah data penting.

Tidak ada alasan akademik untuk menghapus salah satu jenis evidence karena tidak sesuai preferensi. Peneliti harus mengakui trade-off dan uncertainty.

Sikap seimbang bukan berarti false equivalence. Jika terdapat pelanggaran hak yang jelas, ia harus disebut. Jika terdapat kemajuan ekonomi yang nyata, ia juga harus diakui. Objektivitas membutuhkan willingness to update.

Bagi pembuat kebijakan, dialog perspektif tersebut dapat menghasilkan pertanyaan praktis. Apakah suatu kebijakan menghasilkan outcome? Apakah prosesnya legitimate? Apakah mekanisme koreksinya ada? Apakah manfaat dan biaya dibagi fair? Apakah keputusan dapat dipertahankan lintas pemerintahan?

Jika lima pertanyaan tersebut dijawab positif, demokrasi dan pembangunan kemungkinan bergerak searah.

Sebaliknya, kebijakan yang menghasilkan output cepat tetapi bergantung pada discretion personal mungkin tidak sustainable. Kebijakan yang sangat partisipatif tetapi tidak pernah selesai juga gagal.

Mature governance terletak di tengah: decisive but constrained, participatory but executable, ambitious but evidence-based.

Indonesia memiliki tradisi musyawarah dan gotong royong yang dapat diterjemahkan ke dalam governance modern. Musyawarah bukan unanimity, tetapi proses mendengar sebelum keputusan. Gotong royong bukan pengganti negara, tetapi social cooperation.

Nilai lokal tersebut dapat dipadukan dengan institusi modern seperti open data, judicial review, professional bureaucracy, dan competition policy.

Dalam dunia yang semakin tidak pasti, institutional quality menjadi lebih penting karena pemerintah akan sering menghadapi keputusan tanpa informasi sempurna. Sistem terbaik bukan sistem yang selalu benar, tetapi sistem yang cepat mengetahui kesalahan dan mampu memperbaikinya.

Demokrasi memberi correction capacity. Pembangunan memberi execution resources. State capacity menghubungkan keduanya.

Maka posisi akhir artikel ini dapat dirumuskan secara praktis: Indonesia tidak seharusnya mengukur keberhasilan demokrasi hanya dari kebebasan tanpa kinerja, dan tidak seharusnya mengukur keberhasilan pembangunan hanya dari kinerja tanpa kebebasan. Negara maju membutuhkan keduanya.

Pertumbuhan ekonomi yang menghasilkan kelas menengah tetapi tidak memberikan voice dapat menciptakan tekanan politik. Demokrasi yang memberikan voice tetapi tidak menghasilkan mobility dapat menciptakan frustrasi. Institutional synergy mengurangi kedua risiko.

Oleh karena itu, pertanyaan “apakah demokrasi dan pembangunan masih berjalan seiring?” sebaiknya menjadi agenda evaluasi tahunan, bukan slogan. Setiap tahun Indonesia perlu menilai apakah kebijakan memperkuat produktivitas sekaligus accountability.

Dengan cara itu, perdebatan tidak berhenti pada preferensi ideologis, tetapi berubah menjadi proses manajemen nasional yang berbasis bukti.

57. Catatan Metodologis dan Kehati-hatian dalam Membaca Data

Analisis demokrasi dan pembangunan memerlukan kehati-hatian metodologis karena hampir semua indikator merupakan penyederhanaan dari realitas yang kompleks. Pertumbuhan PDB mengukur kenaikan output, tetapi tidak secara langsung mengukur kualitas pekerjaan, distribusi pendapatan, kebahagiaan, atau keberlanjutan. Rasio Gini mengukur distribusi pengeluaran atau pendapatan dalam bentuk tertentu, tetapi tidak menangkap seluruh ketimpangan kekayaan dan kesempatan. Indeks demokrasi juga merupakan konstruksi yang bergantung pada definisi, dimensi, bobot, dan sumber data.

Karena itu, artikel ini menggunakan prinsip triangulasi. Data BPS dipakai untuk indikator ekonomi, sosial, dan IDI; laporan World Bank memberi perspektif terhadap produktivitas dan kualitas pekerjaan; Freedom House dan V-Dem digunakan sebagai evaluasi eksternal terhadap kebebasan dan institusi politik. Perbedaan penilaian antarsumber tidak dianggap sebagai kesalahan yang harus dihapus, melainkan informasi mengenai perbedaan konsep dan metode.

Pembaca perlu menghindari cherry-picking. Memilih hanya indikator yang mendukung posisi politik tertentu akan menghasilkan analisis lemah. Penelitian akademik seharusnya siap menerima bukti yang tidak sesuai dengan ekspektasi awal. Jika ekonomi membaik, kemajuan itu perlu diakui; jika indikator institusional memburuk, sinyal tersebut juga perlu dibahas.

Perbandingan waktu juga harus mempertimbangkan perubahan metodologi. Bila suatu indeks mengubah definisi atau indikator, perubahan skor dapat mencerminkan perubahan pengukuran, bukan hanya perubahan realitas. Karena itu, documentation perlu dibaca.

Korelasi antarindikator tidak membuktikan kausalitas. Kenaikan pertumbuhan dan penurunan kemiskinan dapat terjadi bersamaan dengan perubahan politik, tetapi banyak faktor lain bekerja. Analisis kausal membutuhkan desain lebih kuat.

Data nasional juga dapat menyembunyikan heterogenitas daerah. Jawa, Papua, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku memiliki struktur ekonomi serta kondisi sosial yang berbeda. Karena itu, kesimpulan nasional harus dilengkapi analisis subnasional.

Ada pula masalah lag. Reformasi pendidikan membutuhkan tahun sebelum memengaruhi produktivitas. Pelemahan rule of law mungkin baru memengaruhi investasi ketika terjadi sengketa besar. Karena itu, hubungan institusi dan ekonomi harus dilihat dalam horizon panjang.

Finally, angka bukan pengganti judgement. Data memberi constraint terhadap argumen, tetapi interpretasi tetap membutuhkan teori dan konteks. Tujuan akademik bukan menghasilkan satu angka yang menjawab semua pertanyaan, melainkan membangun penjelasan yang transparan dan dapat diuji.

Dengan disiplin metodologis tersebut, perdebatan tentang demokrasi dan pembangunan dapat bergerak dari slogan menuju evidence-based dialogue. Ini penting karena keputusan nasional terlalu besar untuk didasarkan pada kesan sesaat.

Glossarium

Accountability: Kewajiban pejabat atau institusi menjelaskan keputusan dan menerima konsekuensi atas kinerjanya.

Capable democracy: Demokrasi yang menggabungkan akuntabilitas politik dengan kapasitas negara yang tinggi untuk melaksanakan kebijakan.

Checks and balances: Mekanisme pembatasan dan pengawasan timbal balik antar-lembaga kekuasaan.

Civil liberties: Kebebasan sipil seperti kebebasan berpendapat, berserikat, beragama, dan memperoleh informasi.

Democratic backsliding: Proses kemunduran bertahap pada kualitas institusi demokrasi.

Developmental state: Negara dengan kapasitas tinggi yang secara aktif mengarahkan transformasi ekonomi dan industrialisasi.

Economic development: Proses peningkatan kesejahteraan yang mencakup pertumbuhan, produktivitas, human capital, pemerataan, dan transformasi struktural.

Electoral democracy: Sistem yang menempatkan pemilu kompetitif sebagai mekanisme utama pemilihan kekuasaan.

Governance: Cara kekuasaan, aturan, keputusan, dan sumber daya publik dikelola.

Human Development Index: Indeks komposit pembangunan manusia yang mencakup kesehatan, pendidikan, dan standar hidup.

Inclusive institutions: Institusi yang membuka akses ekonomi dan politik secara luas serta membatasi ekstraksi oleh elite sempit.

Middle-income trap: Situasi ketika negara sulit berpindah dari pendapatan menengah menuju pendapatan tinggi karena produktivitas stagnan.

Political capture: Kondisi ketika proses kebijakan secara tidak proporsional dipengaruhi kepentingan tertentu.

Political economy: Kajian interaksi antara kekuasaan politik, institusi, distribusi sumber daya, dan hasil ekonomi.

Populism: Pendekatan politik yang mengklaim mewakili rakyat melawan elite dan dapat menggunakan kebijakan sederhana untuk masalah kompleks.

Productivity: Kemampuan menghasilkan output dari sejumlah input; sumber utama kenaikan pendapatan jangka panjang.

Rent seeking: Upaya memperoleh keuntungan melalui akses kebijakan, regulasi, atau kekuasaan daripada penciptaan nilai produktif.

Rule of law: Prinsip bahwa kekuasaan dijalankan melalui aturan yang jelas, dapat diprediksi, dan berlaku relatif setara.

State capacity: Kemampuan negara merancang dan melaksanakan kebijakan, memungut pajak, menegakkan hukum, dan menyediakan layanan.

Virtuous cycle: Lingkaran saling memperkuat, misalnya institusi baik meningkatkan pembangunan dan pembangunan memperkuat institusi.

Daftar Pustaka

- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). Democracy does cause growth. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47–100. <https://doi.org/10.1086/700936>
- Barro, R. J. (1996). Democracy and growth. *Journal of Economic Growth*, 1, 1–27. <https://doi.org/10.1007/BF00163340>
- Besley, T., & Kudamatsu, M. (2006). Health and democracy. *American Economic Review*, 96(2), 313–318. <https://doi.org/10.1257/000282806777212053>
- Boix, C., & Stokes, S. C. (2003). Endogenous democratization. *World Politics*, 55(4), 517–549. <https://doi.org/10.1353/wp.2003.0019>
- Doucouliağos, H., & Ulubaşoğlu, M. A. (2008). Democracy and economic growth: A meta-analysis. *American Journal of Political Science*, 52(1), 61–83. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5907.2007.00299.x>
- Feng, Y. (1997). Democracy, political stability and economic growth. *British Journal of Political Science*, 27(3), 391–418. <https://doi.org/10.1017/S0007123497000197>
- Gerring, J., Bond, P., Barndt, W. T., & Moreno, C. (2005). Democracy and economic growth: A historical perspective. *World Politics*, 57(3), 323–364. <https://doi.org/10.1353/wp.2006.0002>
- Helliwell, J. F. (1994). Empirical linkages between democracy and economic growth. *British Journal of Political Science*, 24(2), 225–248. <https://doi.org/10.1017/S0007123400009790>
- Knutsen, C. H. (2012). Democracy and economic growth: A changing relationship? *Government and Opposition*, 47(4), 496–519. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2012.01374.x>
- Papaioannou, E., & Siourounis, G. (2008). Democratisation and growth. *The Economic Journal*, 118(532), 1520–1551. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2008.02189.x>
- Rigobon, R., & Rodrik, D. (2005). Rule of law, democracy, openness, and income: Estimating the interrelationships. *Economics of Transition*, 13(3), 533–564. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0351.2005.00226.x>
- Rodrik, D. (1999). Democracies pay higher wages. *Quarterly Journal of Economics*, 114(3), 707–738. <https://doi.org/10.1162/003355399556115>
- Rodrik, D. (2000). Participatory politics, social cooperation, and economic stability. *American Economic Review*, 90(2), 140–144. <https://doi.org/10.1257/aer.90.2.140>
- Tavares, J., & Wacziarg, R. (2001). How democracy affects growth. *European Economic Review*, 45(8), 1341–1378. [https://doi.org/10.1016/S0014-2921\(00\)00093-3](https://doi.org/10.1016/S0014-2921(00)00093-3)

Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why nations fail: The origins of power, prosperity, and poverty*. Crown. [Buku; tidak memiliki DOI standar.]

Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press. [Buku; tidak memiliki DOI standar.]

Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Persentase penduduk miskin Maret 2025 turun menjadi 8,47 persen*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2025, July 25). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026, April 24). *Indeks Pembangunan Manusia 2025*. BPS-Statistics Indonesia.

Badan Pusat Statistik. (2026, June 30). *Kick Off Evaluasi Nasional IDI 2025, BPS sajikan potret demokrasi Indonesia*. BPS-Statistics Indonesia.

Freedom House. (2025). *Freedom in the World 2025: Indonesia*. Freedom House.

Freedom House. (2025). *Freedom on the Net 2025: Indonesia*. Freedom House.

V-Dem Institute. (2026). *Democracy Report 2026*. University of Gothenburg.

World Bank. (2025, June 23). *Indonesia's economy remains resilient despite global headwinds*. World Bank.

World Bank. (2025, December 16). *Indonesia's economy maintains resilience amid global uncertainty*. World Bank.

Sumber Data Kontemporer Utama

BPS: *Ekonomi Indonesia 2025* (rilis 5 Februari 2026).

BPS: *Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2025* (rilis 25 Juli 2025).

BPS: *Gini Ratio Maret 2025* (rilis 25 Juli 2025).

BPS: *Indeks Pembangunan Manusia 2025* (rilis 24 April 2026).

BPS: *Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia 2025* (30 Juni 2026).

Freedom House: *Freedom in the World 2025 - Indonesia* dan *Freedom on the Net 2025 - Indonesia*.

V-Dem Institute: *Democracy Report 2026*.

World Bank: *Indonesia Economic Prospects / pembaruan ekonomi Indonesia 2025*.